NEGARA MODERATOR

Sebuah Treatise Filosofis Tentang
Rasionalitas dan Kekuasaan

ANDI RYZA FARDIANSYAH

NEGARA MODERATOR

Sebuah Treatise Filosofis Tentang
Rasionalitas dan Kekuasaan

ANDI RYZA FARDIANSYAH

License

NEGARA MODERATOR

© 2025 Andi Ryza Fardiansyah. All rights reserved.

This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4. 0 International License (CC BY-NC-ND 4. 0).

You are free to copy and share this work with others, provided that you attribute it to the author, do not use it for commercial purposes, and do not modify it in any way.

To view a copy of this license, visit https: // creativecommons. org/licenses/by-nc-nd/4. 0/

PENGANTAR PENULIS

Saya menulis buku ini bukan untuk menambah teori, tetapi untuk menagih kesadaran. Selama ini, negara kita telah berbicara terlalu banyak tentang pembangunan, kemajuan, dan kekuasaan, namun semakin sedikit tentang berpikir. Kita memuja kecerdasan teknis, tetapi melupakan kebijaksanaan. Kita mengagungkan data, tetapi kehilangan nalar. Dan di tengah segala kemajuan itu, sesuatu yang paling mendasar perlahan hilang: rasionalitas publik.

Saya bukan akademisi yang menulis dari menara gading. Saya seorang warga negara yang hidup di tengah kebisingan, menyaksikan bagaimana opini menggantikan refleksi, dan bagaimana kekuasaan sering kali menjadi lebih cepat dari pikirannya sendiri.

Kita menciptakan sistem untuk menata hidup bersama, namun lupa bahwa sistem hanya berfungsi sejauh manusia di dalamnya masih mau berpikir.

Negara Moderator lahir dari kegelisahan itu. Bukan sebagai ideologi baru, melainkan sebagai cara berpikir baru tentang kekuasaan dan moralitas. Saya percaya, sebelum memperbaiki sistem, kita

harus memperbaiki kesadarannya dan sebelum berbicara tentang hukum, kita harus berbicara tentang nalar yang melahirkannya.
Karena megara tidak akan pernah lebih baik dari cara berpikir manusia-manusia yang menyusunnya.

Buku ini tidak ditulis untuk menyenangkan pihak mana pun. Buku ini adalah bentuk perlawanan terhadap eksklusivitas pengetahuan yang dikunci di balik gelar, jurnal, dan ruang akademik. Saya menulisnya agar filsafat keluar dari ruang seminar, kembali ke ruang publik. Karena berpikir adalah hak politik setiap warga negara.

Saya menulisnya agar kita mengingat kembali bahwa kekuasaan tanpa nalar adalah bentuk paling halus dari kekerasan, dan kebijakan tanpa kebijaksanaan hanyalah pengulangan dari kesalahan yang sama.

Negara Moderator bukan seruan untuk revolusi politik, tetapi reformasi epistemik. Negara Moderator tidak mengajak kita untuk mengganti sistem, tetapi untuk menyeimbangkan cara berpikir di dalamnya. Negara tidak harus menjadi sempurna, cukup menjadi rasional. Rakyat tidak harus menjadi malaikat, cukup mau berpikir bersama.

Negara tidak mungkin lebih waras dari pikiran orang-orang yang mengelolanya. Maka berpikir, dalam arti yang paling dalam, adalah tindakan

politik tertinggi. Maka buku ini saya tulis bukan karena saya memiliki semua jawabannya, tetapi karena saya tidak ingin berhenti mencari pertanyaan-pertanyaan yang lebih jujur.

Dan jika suatu saat ada seseorang membaca ini, berhenti sejenak, lalu mulai berpikir kembali tentang negaranya, maka seluruh usaha ini menemukan maknanya.

Andi Ryza Fardiansyah
Jakarta, 2025.

E K S O R D I U M

Metafisika Negara dan Keniscayaan Aristokrasi; Sebelum Negara Menyadari Dirinya Sendiri

Sebuah refleksi epistemologis tentang bagaimana melanjutkan pandangan Aristoteles tentang bentuk negara ideal.

Negara Sebagai Evolusi Kesadaran

Dalam pandangan Aristoteles, negara tidak lahir dari kekuasaan, tetapi dari kesadaran manusia tentang keterbatasannya. Ia muncul bukan sebagai kontrak sosial, melainkan sebagai organisme rasional—suatu wujud kehidupan yang lebih tinggi, tempat kesadaran individual bertransformasi menjadi kesadaran kolektif. Aristoteles menyebutnya zoon politikon, makhluk yang hanya menemukan kesempurnaannya ketika hidup dalam polis.

Tetapi polis bukanlah sekadar persekutuan manusia yang berhimpun demi keamanan atau ekonomi. Ia adalah entitas hidup (ens vivum) yang

memiliki "jiwa", sebagaimana setiap organisme yang diciptakan oleh alam (physis). Jiwa negara adalah nalar yang hidup bersama—yakni kesadaran akan kebaikan yang melampaui kepentingan diri.

Dalam pandangan ini, negara bukan benda mati, melainkan subjek kesadaran kolektif yang terus berevolusi. Ia berpikir, menimbang, dan mengatur dirinya sebagaimana manusia yang berakal menata hidupnya. Maka negara dalam pandangan ini tidak didefinisikan sebagai alat, melainkan negara adalah manifestasi kesadaran yang telah mencapai tingkat reflektif tentang dirinya sendiri.

Negara yang demikian tidak utopis. Ia adalah bentuk logis dari evolusi moral manusia. Dimana ketika nalar personal telah cukup matang untuk menegakkan tatanan bersama yang bersumber dari kemampuan memoderasi hasrat kekuasaan.

Kritik Abadi Tentang Demokrasi

Aristoteles memahami demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang pada dasarnya berangkat dari niat baik: memberi ruang bagi kesetaraan dan kebebasan warga. Namun ia juga melihat bahaya yang tersembunyi di dalamnya — bahwa di tangan manusia yang belum memoderasi dirinya, kebebasan dapat menjelma menjadi tirani mayoritas, dan kesetaraan bergeser menjadi penyeragaman yang meniadakan kebijaksanaan.

Demokrasi, dalam pandangan Aristoteles, adalah bentuk pemerintahan yang mudah tergelincir ke arah anarki ketika nalar dikalahkan oleh jumlah, dan kebenaran ditentukan oleh suara terbanyak, bukan oleh pengetahuan tentang kebaikan. Maka demokrasi selalu berada di tepi jurang antara kebajikan dan kebodohan kolektif.

Di sinilah letak kritik abadi Aristoteles terhadap demokrasi. Demokrasi menurut Aristotels membuka ruang bagi semua orang untuk berbicara, tetapi tidak memastikan bahwa yang berbicara memahami apa yang baik. Demokrasi membuka ruang partisipasi, tetapi tanpa memastikan derajat kesadaran yang mengiringinya.

Metafisika Negara dan Keniscayaan Aristokrasi

Aristokrasi, dalam makna aslinya, bukanlah kekuasaan kaum bangsawan, melainkan pemerintahan oleh mereka yang memiliki arête—keutamaan jiwa, kebijaksanaan, dan keinsafan terhadap batas. Bagi Aristoteles, keutamaan adalah puncak dari phronesis, kebijaksanaan praktis yang memberikan manusia kemampuan untuk memilih jalan tengah antara dua titik ekstrem, yaitu kekuasaan tanpa kendali dan kepasrahan tanpa arah.

Namun dalam dunia modern, Aristokrasi mengalami degradasi makna dari konsep yang bisa menjelaskan tentang metafisika negara sebagai evolusi tertinggi kesadaran tentang kemanusiaan, menjadi simbol elitis dalam narasi utopis sehingga kehilangan makna filosofisnya. Maka dari itu, Negara Moderator senyatanya adalah kelanjutan diskursus Aristokrasi sebagai metafisika negara dalam pandangan Aristoteles. Bahwa apa yang kemudian akan terjelaskan dalam seluruh bab di Buku ini adalah tentang konsep negara yang hadir sebagai evolusi kedasaran manusia dan oleh karenanya negara adalah organisme yang hidup dengan kebijaksanaan untuk membatasi kekuasaannya sendiri. Negara Moderator adalah konsekuensi logis dari metafisika negara yang dibangun oleh Aristoteles.

Negara Moderator adalah model paling rasional tentang design negara aristokrasi. Negara Moderator bukan sekadar pemerintahan oleh orang bijak, tetapi oleh kesadaran rasional yang telah menjadi lembaga. Ia adalah negara yang mampu memoderasi dirinya sebagaimana individu bijaksana menahan nafsunya.

Dengan demikian, aristokrasi tidak lagi bergantung pada individu, melainkan pada sistem kesadaran yang tertanam dalam lembaga. Ia adalah aristokrasi kesadaran, bukan aristokrasi kelas. Dan ketika kesadaran ini telah menjadi struktur yang berpikir dan bertindak, maka negara mencapai bentuk

tertingginya—negara yang sadar akan dirinya sendiri.

Sebelum Negara Menyadari Dirinya Sendiri

Sebelum kesadaran itu matang, negara hanyalah arena perebutan. Demokrasi hanya menjadi topeng bagi kehendak kuasa, dan rakyat menjadi cermin yang memantulkan ketidakteraturan dirinya sendiri. Di titik inilah proyek Negara Moderator menemukan urgensinya. Negara Moderator hadir sebagai usaha membangkitkan kesadaran negara agar ia mampu mengenali dirinya, memoderasi dirinya, dan hidup dalam keseimbangan antara kebebasan dan keteraturan.

Negara yang sadar akan dirinya bukanlah negara yang sempurna, tetapi negara yang mampu menimbang. Ia tidak meniadakan konflik, tetapi menuntun konflik menuju harmoni. Ia bukan negara yang membungkam perbedaan, tetapi menata perbedaan agar tidak berubah menjadi kehancuran.

Maka, ketika Aristoteles berbicara tentang polis sebagai tujuan akhir manusia, yang ia maksud bukan sekadar lembaga politik, melainkan tataran kesadaran di mana manusia menemukan dirinya dalam kebersamaan yang rasional.

Dan ketika Negara Moderator berbicara tentang moderasi, yang dimaksud bukan sekadar kebijakan, melainkan sebagai diskursus eksistensial, yaitu cara hidup negara yang telah mencapai taraf reflektif terhadap keberadaannya.

Negara Moderator adalah upaya melanjutkan percakapan yang belum selesai sejak Etika Nikomakea ditulis. Sebuah percakapan tentang bagaimana manusia, setelah menemukan rasionalitasnya, dapat membangun bentuk kehidupan bersama yang tidak lagi didikte oleh kekuasaan, tetapi oleh kesadaran.

Negara, dalam pengertian ini, bukan lagi hasil kompromi sosial, tetapi buah dari evolusi moral dan intelektual umat manusia. Ia adalah makhluk kesadaran, dan kesadarannya itulah yang menjadikannya hidup.

Dan karena itu, di titik paling tinggi dari perjalanan politik manusia, kita akan menemukan bukan demokrasi tanpa arah, melainkan Aristokrasi yang telah menjadi diri negara itu sendiri.

Aristokrasi baru yang hari ini kita sebut sebagai Negara Moderator.

KERANGKA NALAR

Kata Pengantar

Eksordium

BAB I
MENGAPA DUNIA KEHILANGAN KESEIMBANGAN

Krisis Keseimbangan Sebagai Fakta Epistemik.

Hilangnya Rasionalitas Sebagai Asas Politik.

Ekstremitas Sebagai Gejala Peradaban.

Paradoks Kenegaraan di Indonesia.

Keniscayaan Negara Moderator.

Dari Krisis Nalar ke Reformasi Epistemik.

BAB II
MEMBACA ULANG ARISTOTELES

Post Democracy.

Peta Pengetahuan Aristoteles.

Konsep Manusia Politik (Zoon Politikon).

Genealogi Makna Aristokrasi: Nama yang Tidak Pernah Diucapkan.

Kritik Aristoteles Terhadap Demokrasi.

BAB III
MANUSIA ARISTOTELIAN DI ABAD INFORMASI

Krisis Subjek Rasional.

Ontologi Aristotelian tentang Manusia dan Nalar

Transformasi Rasionalitas di Era Modern.

Manusia Algoritmik: Krisis Ontologis Abad Informasi.

Manusia sebagai Fondasi Negara Moderator.

BAB IV
KEKUASAAN, PENGETAHUAN, DAN KEBISINGAN

Kekuasaan Sebagai Masalah Pengetahuan.

Epistemologi Kekuasaan dalam Tradisi Aristotelian.

Mekanisme Distorsi: Dari Nalar ke Narasi.

Ekonomi Perhatian dan Ilusi Demokrasi.

Pengetahuan sebagai Dasar Otoritas Rasional.

BAB V
INSTITUSI DAN RASIONALITAS KOLEKTIF

Negara Sebagai Mekanisme Rasionalitas.

Ontologi Institusi: Dari Alat Kekuasaan ke Struktur Kebajikan.

Rasionalitas Kolektif: Antara Pusat dan Daerah.

Institusionalisasi Moderasi.

Negara Sebagai Entitas Epistemik.

Negara sebagai Sistem Moderasi Rasional.

BAB VI
MODERASI SEBAGAI PRINSIP ONTOLOGIS KEKUASAAN

Moderasi Sebagai Keberadaan, Bukan Sikap.

Ontologi Moderasi dalam Filsafat Aristotelian.

Dari Etika ke Ontologi Kekuasaan.

Dialektika Kekuasaan dan Moderasi.

Moderasi Sebagai Prinsip Konstruktif Negara.

Negara Moderator Sebagai Manifestasi Ontologis Moderasi.

Moderasi sebagai Logos Negara.

BAB VII
DARI TEORI KE PRAKSIS

Antara Konsep dan Kehidupan.

Ontologi Praksis Negara Moderator.

Krisis-Krisis Universal Dunia Modern.

Rasionalitas Administratif dan Kebijaksanaan Publik.

Praksis Politik Moderat: Dari Kekuasaan ke Kepemimpinan Rasional.

Praksis Sebagai Peneguhan Rasionalitas.

BAB VIII
NEGARA SEBAGAI KESADARAN DIRI

Negara yang Menyadari Dirinya.

Epistemologi Kesadaran Negara.

Etika Negara yang Dewasa.

Kesempurnaan dalam Keterbatasan.

Anámnēsis – Kembali ke Rasionalitas Publik

Daftar Pustaka

BAB I
MENGAPA DUNIA KEHILANGAN KESEIMBANGAN

Krisis Keseimbangan Sebagai Fakta Epistemik

Dalam diskursus tentang sejarah ilmiah, sejarah tidak dipandang hanya sebagai narasi deskriptif tanpa keterhubungan dengan prinsip-prinsip universal, berupa hukum absolut yang menjadi framework gerak setiap zaman. Walaupun mereka berbeda pada setiap manifestasi di ranah partikulir, yaitu tentang apa yang terjadi. Namun, pada dasarnya setiap sejarah berulang sebagai sebuah konsep walaupun dalam konteks, ruang dan waktunya masing-masing.

Saya tidak sedang menguji kerangka epistemik tentang tesis sejarah dalam tulisan ini, karena tulisan ini bukan diskursus tentang sejarah. Namun saya harus memulai diskusi dalam buku ini dengan perspektif sejarah Ilmiah untuk mereposis topik

utama dalam tulisan ini. Yang hari ini mengalami pergeseran makna dari hasil berfikir ke sakralitas yang menciptakan pemujaan nirmakna.

Dalam perspektif sejarah ilmiah, perubahan itu terjadi karena adanya benturan yang melahirkan krisis. Krisis kemudian menjadi pemicu utama yang akan melahirkan diskursus baru. Karena krisis adalah sebuah refleksi dari kesadaran ontologis manusia tentang realitas. Maka dari itu, setiap zaman memiliki krisisnya sendiri. Termasuk hari ini, adalah zaman yang ditandai oleh satu krisis universal, yaitu hilangnya keseimbangan antara akal dan kekuasaan.

Krisis ini sejatinya lahir dari konsekuensi logis perkembangan ilmu pengetahuan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, kemampuan manusia untuk menggunakan pengetahuan secara bijaksana justru menurun. Perkembangan kecepatan informasi dan perubahan diskursus dengan kecepatan yang belum pernah terjadi saat ini, membuat manusia tidak lagi mengenal hakikat sebagai pengetahuan tertinggi. Pengetahuan tidak lagi hadir sebagai hasil dari kontemplasi epistemologis atau dialektika ide dan kesadaran, namun pengetahuan berhenti sebagai persepsi atas fenomena inderawi.

Hal ini kemudian melahirkan sebuah fenomena baru, yaitu masyarakat cerdas yang tidak mengerti moralitas. Dimana tindakan bukan lagi manifestasi

kesadaran aksiologis, namun tindakan hadir sebatas respon atas fenomena sosial. Manusia tidak bertindak sebagai sebuah mahluk yang berfikir, tapi manusia bertindak karena memiliki indera dengan kemampuan merespon fenomena empiris. Ini menunjukkan bahwa progres rasional hari ini tidak selalu identik dengan kemajuan moral, yang hanya bisa lahir dari kempuan berfikir yang melampaui empirisme.

Model krisis ini tidak dapat dipahami sebagai masalah teknis atau moral belaka, tetapi sebagai krisis epistemik yang mendistorsi relasi antara cara manusia berpikir dan realitas yang dibentuk oleh pikirannya sendiri. Manusia menciptakan sesuatu yang tidak dipahaminya. Karena pengetahuan hari ini tidak pernah lagi menyentuh ranah yang paling substansial tentang realitas. Mereka tahu membuat sesuatu tapi tidak mengerti hakikat sesuatu itu. Manusia modern adalah manusia yang menciptakan sistem yang begitu kompleks hingga akhirnya terperangkap di dalamnya.

Hal ini kemudian melahirkan konsekuensi logis, yaitu pada ranah sistemik kita menjadi korban dari produk intelektualitas kita sendiri. Kita menciptakan sistem ekonomi yang menindas, tradisi agama yang menipu, algoritma yang memanipulasi, pemujaan terhadap kuantitas kemasan, definisi kebahagiaan tanpa nilai, standard nilai baru yang didefinisikan dari warna kulit dan trend cara berpakaian dan secara tidak sadar

menciptakan mekanisme kekuasaan yang mengatur bukan demi kebajikan, melainkan efisiensi yang melegitimasi kepentingan pengendalinya.

Dari perspektif epistemologi politik, inilah bentuk dislokasi rasionalitas manusia dalam politik. Dimana nalar akhirnya terlepas dari etika, dan etika akhirnya kehilangan basis rasionalnya. Nalar digunakan dalam kerangka kesadaran sebagai mesin produksi. Nalar hari ini adalah nalar tentang bagaimana memproduksi komoditas dan bahkan nalar yang diperjual-belikan sebagai komoditas. Nalar hari ini bukan nalar yang tentang kesadaran epistemologis atau nalar hasil kontempelasi aksiologis, sehingga tidak digunakan sebagai medium reflektif yang mengevolusi kesadaran ontologis.

Hari ini, tafsir atas realitas kehilangan keseimbangannya. Keseimbangan yang dulu menjadi syarat bagi kehidupan beradab dan merupakan definisi tertinggi tentang manusia kini tergantikan oleh ekstremitas. Cara berfikir yang lahir dari nalar yang tidak mengerti kebijaksanaan sebagai jalan tengah. Manusia tidak lagi hidup di bawah prinsip mesotes (keutamaan tengah), melainkan di bawah hukum ekstrem, antara emosi yang meledak dan logika yang dingin.

Hilangnya Rasionalitas Sebagai Asas Politik

Aristoteles mendefinisikan manusia sebagai zoon politikon, yaitu makhluk yang hanya dapat mencapai kebajikan melalui kehidupan bersama. Konsep tentang zoon politikon. Bagi Aristoteles, kehidupan politik bukan sekadar mekanisme kekuasaan, melainkan ruang dimana moral, nalar dan tindakan berjalan dalam keseimbangan seimbang.

Namun, politik modern hari ini hadir dengan wajah yang sangat jauh pengertian ini. Politik bukan lagi hadir sebagai sebuah interpretasi nalar akan kesadaran ontologis kemanusiaan, melainkan politik hadir dengan wajahnya yang paling pragmatis. Politik hari ini adalah arena transaksi kekuasaan. Politik adalah komoditas yang dipertukarkan dengan kepentingan ekonomi. Kekuasaan adalah puncak dari penindasan serta degradasi kemanusiaan. Tidak ada satupun ruang yang tersisa bagi moralitas dan nalar kemanusiaan. Sebuah fenomena yang memaksa intelektualitas harus berada di panggung pertarungan ideologi-ideologi yang senyatanya hanya jargon kosong yang menyembunyikan oligarki.

Adapun modernitas, yang seharusnya lahir dari perkembangan sains dan teknologi dalam upayanya menaklukkan alam, menjadikan rasionalitas instrumental sebagai paradigma utama. Cara berfikir yang yang menilai sesuatu semata-mata

dari hasil dan efisiensi. Cara berfikir yang menjadikan fungsi sebagai indikator utama dan masyarakat tidak lebih dari mesin besar yang terdiri dari komponen-komponen kecil dengan fungsi masing-masing. Masyarakat dalam definisi ini adalah sistem mekanis yang berasal dari sintesis fungsi setiap individu. Tanpa fungsi, maka tidak ada hasil. Fungsi pun harus berjalan dengan sangat efisien untuk menghasilkan hasil yang maksimal.

Manusia yang tidak memiliki fungsi dalam sintesis mekanis yang disebut masyarakat tidak akan mendapatkan tempat. Bahkan seharusnya tidak dianggap sebagai manusia. Walaupun ada suara-suara kecil yang masih tetap berteriak untuk memberikan celah kecil terhadap kemanusiaan, kesetaraan atau ruang-ruang sosial pada manusia yang tidak memiliki fungsi produksi, tetap saja rasionalitas instrumental yang telah termanifestasikan sampai kepada cara kita melihat diri kita setiap hari.

Kita bersekolah, bukan untuk belajar berfikir benar dan mengenal kebijaksanaan. Namun kita bersekolah sebagai lisensi dan sertifkasi bahwa kita adalah mesin yang siap berproduksi dan menjadi bagian dari sintesis mekanis yang disebut sebagai masyarakat.

Habermas kemudian mengkritik pergeseran paradigmatik ini sebagai kolonialisasi manusia oleh sistem. Dimana rasionalitas praktis digantikan oleh

rasionalitas teknokratis, dan deliberasi digantikan oleh administrasi.

Apa yang kemudian hadir sebagai konsekuensi logis dari rasionalitas instrumental ini adalah politik yang kehilangan arah. Karena konsep politik sebagai kebijaksanaan ontologis manusia tidak lagi dapat diharapkan sebagai medium untuk mewujudkan kebajikan dan kebaikan bersama. Dengan model politik seperti ini, maka negara tentu saja akan diperlakukan bukan sebagai wadah bagi kebajikan kolektif, melainkan sebagai mesin pengelola sumber daya. **Kebijakan publik pun hadir dalam manifestasinya yang paling material yaitu sebagai hasil kalkulasi matematis, bukan refleksi etis.**

> *"Maka ketika politik kehilangan dimensi moralnya, nalar publik pun kehilangan maknanya. Dunia menjadi efisien tetapi tidak beradab, cepat tetapi tanpa arah. "*

Ekstrimitas Sebagai Gejala Peradaban

Krisis keseimbangan global yang terjadi saat ini melahirkan tiga bentuk ekstrimitas utama yang menjadi penyakit peradaban, yaitu:

1. Ekstremitas Informasi

Informasi yang berlimpah tidak melahirkan pemahaman, tetapi kebingungan. Rasionalitas publik yang seharusnya deliberatif kini dibentuk oleh algoritma yang bekerja berdasarkan intensitas, bukan kebenaran.

Yang paling keras dianggap paling benar.

Dalam konteks epistemik, ini adalah bentuk baru *tyranny of noise* — tirani kebisingan yang menggantikan tirani kekuasaan.

2. Ekstremitas Kekuasaan

Kekuasaan politik hari ini tidak lagi dimonopoli negara, melainkan tersebar dalam jaringan korporasi, media, dan data. Foucault menyebut ini sebagai *microphysics of power* — kekuasaan yang bekerja di segala level kehidupan, bahkan dalam cara kita berpikir.

Kekuasaan menjadi tanpa wajah, tetapi total. Ia tidak menindas melalui larangan, melainkan melalui pengalihan perhatian.

3. Ekstremitas Moral

> Dalam masyarakat yang kehilangan orientasi rasional, moralitas mengalami reduksi. Ia tidak lagi menjadi orientasi tindakan, tetapi sekadar identitas simbolik.
>
> Orang tidak mencari kebenaran, melainkan pembenaran.
>
> Mac Intyre menyebut kondisi ini sebagai fragmentasi moral: ketika nilai kehilangan konteks teleologisnya, dan kebajikan menjadi relatif.

Ketiga ekstremitas ini bekerja simultan, menimbulkan satu akibat tunggal yaitu runtuhnya keseimbangan nalar publik. Hari ini, manusia modern hidup di bawah rasionalitas hiperaktif yang selalu bergerak, tapi tidak tahu akan ke mana. Hari ini manusia modern adalah manusia dengan perspektif yang luas, tapi tanpa pemahaman. Hari ini, manusia modern adalah manusia yang bernegara tapi tidak beradab.

Paradoks Kenegaraan di Indonesia

Fenomena ekstremitas global yang terjadi sampai hari ini juga menemukan bentuk lokalnya di Indonesia. Banyak paradoks yang terjadi di setiap

diskursus dan sistem sosial. Salah satunya adalah paradoks dalam diskursus ketatanegaraan. Khususnya tentang bentuk negara. Paradoks tentang bentuk negara hari ini adalah paradoks yang lahir dari ekstrimisme perspektif melihat bentuk negara sebagai sebuah diskursus. Ada pergeseran perspektif dari bentuk negara yang lahir sebagai hasil berfikir, ke bentuk negara yang sakral dan tidak bisa berubah.

Fakta historis memberikan gambaran dengan sangat jelas bahwa "Indonesia" bukanlah terminologi yang merepresentasikan sebuah nation state, melainkan Indonesia adalah political state. Sejarah terminologi Indonesia sebagai sebuah klaim kebangsaan itu dimulai sejak tahun 1928. Dalam forum sumpah pemuda. Indonesia lahir sebagai gagasan politik yang mempersatukan. Maka dari itu, pilihan para founding father kita pada masa awal kemerdekaan, ketika mereka ingin merumuskan bentuk negara, pilihannya kemudian jatuh pada bentuk negara kesatuan. Kita pernah mencoba federal, tapi gagal - dalam pengertian apapun – dan akhirnya memilih kembali pada bentuk negara kesatuan sampai hari ini.

Konsekuensi logis dari ekstrimisme global hari ini kemudian menjadikan diskursus tentang bentuk negara di Indonesia harus berhenti hanya pada dua kutub, apakah sebuah negara adalah Negara Kesatuan atau Negara Federal. Hal ini kemudian menjadi paradoks, Karena sampai hari ini

keduanya justru diperlakukan bukan sebagai konsep rasional yang lahir dari aktifitas berfikir manusia, melainkan sebagai simbol ideologis dengan nilai sakralitas yang harus dijaga. Akibatnya, setiap upaya reflektif untuk meninjau ulang sistem kenegaraan di Indonesia hari ini dipandang sebagai ancaman terhadap bentuk negara kesatuan.

Paradoks ini mencerminkan, bahwa Indonesia saat ini kehilangan rasionalitas deliberatif di tingkat nasional. Kita lebih sibuk mempertahankan bentuk daripada memperbaiki isi. Negara dijaga seperti simbol suci, bukan seperti sistem rasional yang harus terus disempurnakan melalui dialektika gagasan. Kita seolah terlarang untuk menyebutkan bahwa fakta sosio-historis menjadikan Indonesia sebagai political state bukan nation state.

Kritik atas hal itu dibungkam dalam ruang-ruang akademik, karena kritik atas bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan seolah dianggap sebagai bentuk perlawanan dan keberpihakan terhadap federalisme. Terlalu dangkal dan terlalu naif. Padahal kita punya sejarah otoriterianisme yang panjang, yang hadir sebagai konsekuensi logis dari kekuasaan yang sentralistik di tangan seorang diktator.

Fenomena yang akhirnya memaksa Indonesia merumuskan modifikasi baru bagi konsep negara kesatuan. Namun modifikasi tersebut bukan

sesuatu yang lahir dari gagasan untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan, melainkan sebagai reaksi psikologis yang trauma dengan otoriterinisme rezim sebelumnya. Otonomi daerah adalah konsep yang seharusnya bergerak meninggalkan kutub sentralistik pada konsep negara kesatuan ke arah desentralisasi federalisme. Namun ekstrimisme yang hanya menyisakan dua, seolah menuutup lahirnya gagasan baru tentang negara desentralisasi yang tidak meninggalkan frame negara kesatuan. Yang akhirnya kita terjebak pada perdebatan tak berujung tentang mana yang terbaik antara Negara Kesatuan atau Negara Federal. Perdebatan tentang bentuk yang melupakan substansi negara. Dan bahkan hal itu tampak pada tidak adamya teori baru yang lahir tentang negara. Seolah bentuk negara berhenti pada dua model tersebut.

Perdebatan tanpa ujung itu akhirnya melahirkan stagnasi dalam diskursus ketatanegaraan terkait bentuk negara. Stagnasi yang menurut Aristoteles adalah bentuk stagnasi nalar politik diman bentuk (morphē) mengalahkan substansi (ousia). Kita merumuskan desentralisasi dengan trauma masa orde baru, tapi lupa membangun gagasan teoritis dan filosofis tentang hubungan pusat – daerah. Desentralisasi akhirnya menjadi otonomi yang liar tanpa arah.

Sementara itu, realitas sosial menunjukkan ketimpangan desentralisasi yang akut. Otonomi

daerah tidak membangun kemandirian, tetapi sering kali melahirkan feodalisme lokal. Pusat kehilangan fungsi integratifnya karena sibuk mempertahankan otoritas formal, bukan legitimasi rasional. Akhirnya, sentralisasi absolut dan otonomi liar menyebabkan diskursus epistemik tentang sistem ketatanegaraan kita rentan terhadap disintegrasi logika.

Keniscayaan Negara Moderator

Jika semua sistem negara adalah hasil dari proses berpikir manusia, dan jika realitas hari ini memperlihatkan paradoks antara kesatuan dan federalisme, maka secara logis lahirlah kebutuhan akan teori baru. Teori ini seharusnya menjadi jalan tengah yang menentang ekstrimitas sebagai krisis global hari ini dan menjadi makna baru tentang desentralisasi. Tidak hanya sekedar pemberian kewenangan, namun sebuah kesadaran akan kewenangan.

Teori tentang negara yang menjadi titik tengah, adalah konsep tentang negara yang memberikan ruang partisipasi besar kepada daerah untuk menentukan nasibnya, dan pusat adalah moderator yang menjaga lalu-lintas kewenangan daerah yang otonom dan menjadi kesatuan kerangka kerja hubungan antar daerah dalam model negara kesatuan.

Artinya, dalam teori ini, pusat adalah jembatan yang menghubungkan antara daerah satu dengan daerah yang lain dalam interaksi dan lalu lintas kewenangan. Disebut pusat bukan karena dia berada dalam hierarki yang lebih tinggi secara kewenangan, namun disebut Pusat karena semua aliran kewenangan bertemu di level birokrasi tersebut.

Maka, teori ini menuntut evolusi pengetahuan dan kesadaran manusia yang kemudian akan menjadi pengendali kewenangannya. Evolusi yang menggeser definisi kewenangan dari kekuasaan ke pelayanan dan dari pemerintah ke moderator.

Teori ini bernama Negara Moderator.

Negara Moderator bukan teori yang menjadi titik kompromi atas ekstrimitas karena ekstirmitas lahir dari paradigma yang berbeda. Moderator sebagai teori yang membentuk kewenangan negara merupakan konsekuensi logis dari prinsip kebijaksanaan kolektif yang menjadi tujuan dari negara dalam Pandangan Aristoteles. Maka dari itu, Moderasi dalam teori ini adalah hasil penerapan prinsip rasionalitas praktis terhadap paradoks kenegaraan. Ia berdiri di tengah bukan karena tidak tegas, melainkan karena merupakan pilihan interpretasi rasional dari nalar yang tegas dalam keseimbangan. Moderasi, dalam kerangka ini, bukan titik netral di antara dua ekstrem, tetapi tindakan aktif yang menyeimbangkan gerak negara.

Maka dalam konsep ini pula, makna check and balances akan menemukan bentuknya yang paling sempurna di tataran praktis.

Dalam Negara Moderator:

- Pusat dipahami bukan sebagai puncak hierarki kekuasaan, tetapi sebagai poros rasionalitas yang menjaga konsistensi kebijakan nasional.

- Daerah dipahami bukan sebagai entitas subordinat, tetapi sebagai unit moral-politik yang otonominya dikontrol oleh prinsip kebajikan kolektif.

- Otoritas bergeser makna: dari hak untuk memerintah menjadi kewajiban untuk memoderasi.

Dengan demikian, Negara Moderator merekonstruksi hubungan antara kekuasaan dan nalar yang mendefinisikan moderasi sebagai paradigma institusional.

Dari Krisis Nalar Ke Reformasi Epistemik

Krisis multi-dimensi yang terjadi saat ini, membuat hilangnya keseimbangan dunia modern bukan lagi sekadar masalah moralitas yang hilang, tetapi krisis yang menyebabkan dunia modern kehilangan

rasionalitas yang berakar pada etika. Krisis ini menuntut pembaruan bukan hanya dalam sistem politik, tetapi dalam cara manusia berpikir tentang politik itu sendiri. Oleh karena itu, diskursus Negara Moderator merupakan diskursus yang harus bisa diuji akar teori serta struktur epistemologi yang membentuk pandangan dunianya. Karena apabila Negara Moderator ini diposisikan sebagai solusi atas krisis, maka seharusnya konsep ini bisa diuji sampai kepada ide-idenya yang paling fundamental tentang negara. Maka pembahasan buku ini senyatanya adalah argumentasi terkait ide-ide dari konsep paling dasar yang darinya Negara Moderator hadir sebagai keniscayaan evolusi bentuk negara hari ini.

Negara Moderator hadir sebagai struktur epistemik terhadap hilangnya makna pada diskursus ketatanegaraan akibat ekstrimitsas. Negara Moderator menawarkan kerangka baru bagi politik rasional yang tidak tunduk pada ekstremitas ideologi, ekonomi, atau diskriminasi identitas.

Di dalam Negara Moderator, kekuasaan dan kebenaran tidak lagi saling mendominasi, tetapi saling mengoreksi. Maka dari itu, keseimbangan politik tidak lahir dari kompromi, transaksi dan negoisiasi aktor, tetapi dari kebijaksanaan berpikir. Dan kebijaksanaan berpikir hanya mungkin jika manusia kembali menempatkan akal sebagai pusat moralitas dan negara sebagai manifestasi rasionalitasnya.

BAB II
MEMBACA ULANG ARISTOTELES

Post Democracy

Konsep tentang Negara Moderator adalah konsep yang kami sandarkan pada pemikiran Aristoteles tentang Manusia, Etika dan Politik. Banyak hari ini yang membaca Aristoteles dari penafsir, tapi tidak pernah betul-betul membaca dan bahkan membedah bagaimana Aristoteles membahas tentang Manusia, Etika dan Politik sebagai diskursus yang terhubung. Aristoteles dalam tradisi filsafat barat tidak diperlakukan secara objektif dan cenderung dipaksakan untuk masuk dalam klasifikasi filsafat alam yang selalu mendapatkan predikat tradisional, tidak modern atau klasik, tanpa pernah membedah perangkat epistemologis yang digunakan Aristoteles dalam dalil-dalil dan argumentasi-argumentasinya.

Justifikasi tersebut akhirnya menempatkan pemikiran Aristoteles sebagai pemikiran yang seolah tidak moderen hari ini, padahal konsep tentang negara yang paling modern hari ini yaitu

Demokrasi, adalah konsep yang bahkan lebih tua dari pemikiran Aristoteles. Karena ketika Aristoteles mengkritik demokrasi dalam bukunya yang berjudul Politics, maka demokrasi sebenarnya adalah sistem yang lebih dahulu ada daripada pemikiran Aristoteles.
Maka dari itu, secara fair seharusnya kita memposisikan pemikiran Aristoteles sebagai pemikiran post democracy. Bahwa mengapa Aristoteles kemudian membangun gagasan tentang Zoon Politikon dan menempatkan Politik sebagai gagasan yang seharusnya lahir setelah Etika, karena Aristoteles lahir dan besar di tatanan demokrasi. Sehingga konsep tentang bentuk pemerintahan ideal pemerintahan yang disebutnya sebagai Politea.

Maka peta pemikiran Aristoteles sebenarnya adalah membangun narasi tentang Politea sebagai bentuk pemerintahan ideal. Dimana upaya untuk mencapai hal itu disebut politik. Politea adalah pemerintahan yang dijalankan oleh orang yang mengerti tentang pengetahuan teoritis (philosophia) dan kebijaksanaan praktis (phronesis). Artinya politik adalah diskursus setelah demokrasi.

Peta Pengetahuan Aristoteles

Aristoteles memulai pembahasan Etika Nikomakea dengan menyatakan bahwa semua tindakan manusia memiliki tujuan (telos), dan tujuan

tertinggi dari hidup manusia adalah kehidupan yang baik dan bermakna atau eudaimonia dalam terminologi Aristoteles. Aristoteles menjelaskan bahwa untuk mencapai eudaimonia, manusia membutuhkan pengetahuan yang tepat tentang kebaikan, sehingga Aristoteles membagi pengetahuan (epistem) manusia menjadi dua secara garis besar, yaitu apa yang kita kenal dengan istilah pengetahuan teoritis dan pengetahuan praktis.

Secara sederhana, saya ingin menyampaikan kepada kalian semua seperti ini:

Pengetahuan Teoritis (sophia) menurut Aristoteles adalah pengetahuan tentang konsep-konsep dasar. Konsep-konsep dasar ini berupa prinsip-prinsip universal yang ada di realitas. Pengetahuan teoritis menyelidiki sebab terjadinya sesuatu serta merumuskan bentuk ideal yang menjadi tujuan dari keberadaan sesuatu itu. Oleh karena itu, Pengetahuan Teoritis adalah pengetahuan tentang sesuatu sebagaimana adanya sesuatu itu.

Pengetahuan Praktis (phronesis) adalah pengetahuan teknis tentang bagaimana manusia melakukan tindakannya atau bertindak terhadap realitas. Secara konsep, idealnya Pengetahuan Praktis harus diturunkan dari Pengetahuan Teoritis. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari Pengetahuan Teoritis yang memberikan pandangan tentang konsep dasar sesuatu dan tujuan ideal

sesuatu. Maka dari itu, Pengetahuan Praktis adalah pengetahuan tentang bagaimana memperlakukan sesuatu sebagaimana mestinya.

Aristoteles menegaskan bahwa phronesis tanpa sophia adalah buta dan sophia tanpa phronesis adalah steril. Sophia memberi arah dan tujuan bagi tindakan, sedangkan phronesis menerjemahkan tujuan itu menjadi keputusan dan tindakan nyata. Aristoteles dalam Etika Nikomakea menyatakan seperti ini:

"It is impossible to be truly prudent without understanding the universal. " (Ethica Nicomacea. VI. 7, 1141b15-20).

Maka dari itu, konsep manusia yang menjadi pemimpin masyarakat harus memiliki kedua pengetahuan tersebut. Pemimpin harus memiliki akal yang memahami prinsip kebaikan dan kebijaksanaan praktis untuk merumuskan tindakan yang baik bagi semua orang.

Konsep Manusia Politik

Menurut Aristoteles, posisi manusia dalam pengetahuan adalah apa yang disebutnya dengan istilah zoon logon echon atau mahluk yang memiliki nalar. Sehingga seharusnya kualitas tertinggi manusia bukan terletak pada kekuatan fisiknya,

melainkan pada kemampuannya untuk mengatur dirinya sendiri melalui akal.

Konsep dasar tentang akal dan nalar yang memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri adalah apa yang dimaksud dengan kesadaran tertinggi dari kebijaksanaan. Maka orang-orang bijak adalah orang yang akalnya telah sampai pada kesadaran untuk membatasi dan mengatur dirinya sendiri. Inilah poros dasar yang menjadi inti dari Teori Negara Moderator.

Menurut Aristoteles, fungsi kepemimpinan seharusnya diberikan kepada manusia yang telah menyempurnakan fungsi akalnya, bukan sekedar terpilih dalam sebuah pemilihan namun tidak memiliki kesadaran akan kebijaksanaan praktis. Pemimpin bukan orang yang berkuasa karena ingin mengatur atau memerintah orang lain. Namun pemimpin adalah pengatur nalar kolektif masyarakat.

"The good ruler must be ruled by reason, not by passion; for he who cannot govern himself, cannot govern others. " (Ethica Nicomacea. X. 9, and Pol. III. 4)

Maka dari itu, konsep zoon politicon adalah konsep tentang bentuk evolusi tertinggi dari zoon logon echon.

Pengetahuan pada manusia, merupakan hal yang terlahir secara natural bersama fisik manusia. Jadi pengetahuan pada manusia itu merupakan substansi alamiah manusia. Tidak ada manusia yang teralahir tanpa pengetahuan, namun perkembangan pengetahuan manusia beda-beda. Pengetahuan manusia berkembang dari pengetahuan sederhana tentang aktivitas fisik, kemudian berkembang ke pengetahuan tentang kebutuhan akan kehidupan bersama, dan yang paling tinggi adalah pengetahuan yang membawa kebijaksanaan yang merubah kehidupan bersama menjadi kebajikan kolektif.

Maka dari itu, secara alamiah manusia adalah mahluk politis. Karena politik adalah perkembangan dari pengetahuan yang ada pada manusia secara natural. Dalam pengertian inilah Aristoteles mendefinisikan manusia sebagai Zoon Politicon.

Maka dari itu, Zoon Politicon – mahluk politik – adalah Manusia yang sudah menyempurnakan fungsi akalnya. Manusia yang memiliki sophia dan phronesis terbaik yang dapat meregulasi dan membatasi dirinya sendiri, sebagai konsekuensi dari kemampuan akal untuk mengatur dirinya sendiri.

Aristoteles menjelaskan bahwa phronesis adalah bentuk kebijaksanaan yabg berhubungan langsung dengan tindakan manusia dalam polis. Dalam buku

Etika Nikomakea, Aristoteles menyebut bahwa phronesis adalah kebijaksanaan politik (politike phronesis), yaitu kemampuan menimbang tindakan yang membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat.

"*Political prudence is concerned with the common good; it is a kind of prudence that directs actions not for oneself, but for the city.*" (Ethica Nicomacea, VI. 8).

Karena itu, pemimpin sebagai subjek inti yang mengendalikan masyarakat harus memiliki phronesis dalam arti publik. Yaitu kemampuan menilai kepentingan bersama melampaui kepentingan pribadi.

Maka dari itu, dalam peta pengetahuan Aristoteles sebagaimana diatas, kita bisa melihat bahwa hubungan antara phronesis dan sophia merupakan sebuah sintesis yang natural. Sehingga dalam urutan pengetahuannya, Aristoteles menempatkan Politik sebagai pengetahuan praktis dari Etika. Atau dalam beberapa kesempatan saya selalu menjelaskan dengan kalimat:

"Etika dulu, baru politik".

Dalam bahasa Aristoteles, The Statesman is the practical philosopher. Aristoteles bahkan tidak menggunakan terminologi politician yang menjadi kata untuk menyebut orang yang berpolitik hari ini. Dia menggunakan kata "The Statesman", karena

politik bukan sekedar menjalankan aktifitas pemerintahan, melainkan kebijaksanaan untuk mengartur nalar kolektif.

Genealogi Makna Aristokrasi: Nama Yang Tidak Pernah Diucapkan

Hal penting yang harus dipahami adalah Aristokrasi bukanlah nama atas sistem normatif pemerintahan yang dia usulkan sebagai solusi atas kritiknya terhadap bentuk pemerintahan yang ada pada saat itu yaitu Demokrasi dan Oligarki. Aristoteles tidak pernah menyebutkan nama khusus untuk bentuk pemerintahan ideal yang dijelaskannya dalam bukunya yang berjudul Ethica Nicomacea dan Politics. Aristokrasi adalah label pasca Aristoteles yang diberikan oleh pemikir yang mencoba untuk menerjemahkan pemikiran Aristoteles tentang bentuk pemerintahan ideal.

Dalam semua tulisannya, Aristoteles bahkan belum sampai pada penjelasan tentang bentuk kelembagaan negara, organisasi negara serta hubungan pusat dan daerah. Karena pada saat itu, bentuk negara pun masih sederhana. Demokrasi di tingkatan polis juga tidak dalam bentuk kelembagaan seperti yang kita pahami saat ini, begitpun dengan Oligarki.

Istilah Aristokrasi sebagai nama sistem pemerintahan Aristoteles adalah tradisi interpretasi pasca paripatetik yang muncul dari murid-murid Aristoteles dan para komentator Helenistik – Romawi.

Dalam Politics III. 7-13, Aristoteles menggunakan kata "politea" untuk merujuk bentuk "mixed constitution" yang diidealkan. Namun karena dia menegaskan bahwa yang memerintah seharusnya the best man (aristoi), oleh para penafsir kemudian menyebutnya sistem Aristokria. Sistem ini kemudian dikonseptualkan ulang oleh Polybios dan Cicero, yang menggunakan istilah Aristokria, sebagai salah satu bentuk mixta respublica (campuran terbaik).

Lalu di abad pertengahan, Thomas Aquinas menerjemahkan Politics dari perspektif De Regimine Principum sebagai dasar filsafatnya dan menegaskan bahwa Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan terbaik sejauh dijalankan oleh mereka yang berkekuatan moral dan intelektual. Sejarah abad pertengahan sebagai skolastik membuat posisi filsafat Thomas Aquinas menjadi filsafat yang harus dianggap melegitimasi pengekangan rasionalitas. Sehingga terjemahan Thomas Aquinas terhadap Politics Aristoteles juga akhirnya mendapatkan pelabelan yang sama. Hanya dianggap pemikiran klasik dalam catatan sejarah pengetahuan manusia.

Dan puncaknya adalah pada tulisan pemikir politk di era rennaisance seperti Baron de Montesquieu, Alexis de Tocqueville dan Niccolo Machiavelli yang kemudian membuat klasifikasi tetap terhadap perubahan model kekuasan negara dalam sejarah dengan alur Monarki > Aristokrasi > Demokrasi. Sehingga semua literatur politik yang kemudian hadir pasca rennaisance akan menjadikan alur itu sebagai alur tetap melihat perubahan model kekuasaan pada negara. Membentuk keyakinan setiap orang sampai hari ini bahwa Aristokrasi penamaan dari Aristoteles dan Aristokrasi berada sebelum Demokrasi.

Sebuah pembodohan publik yang masih dipercaya sampai hari ini. Inilah awal dari krisis epistemik manusia tentang kekuasaan hari ini. Dengan salah menempatkan Demokrasi sebagai kekuasaan setelah Aristokrasi dan menuduh Aristoteles mengajarkan Aristokrasi. Kesalahan yang akhirnya menempatkan pemikiran Aristoteles sebagai bagian dari sejarah pemikiran tanpa pernah dikaji dan dibahas secara objektif menurut cara berfikirnya.

Kritik Aristoteles Terhadap Demokrasi

Demokrasi bersama Oligarki sebenarnya diskursus tentang bentuk-bentuk kekuasaan pada sebuah negara. Kepada siapa kekuasaan itu harus diberikan dan bagaimana cara mengelola kekuasaan itu. Hari ini Demokrasi dan Oligarki tidak pernah

didudukkan pada posisi diskursus awalnya. Demokrasi dijadikan jargon tentang keadilan dan sebagai lawan dari Oligarki. Padahal tidak pernah ada sejarah yang menjelaskan bahwa Demokrasi merupakan antitesa dari Oligarki. Demokrasi dan Oligarki di masa Aristoteles adalah bentuk pemerintahan yang muncul pada satu era yang sama dan menjadi pilihan model pada polis-polis yang berdiri saat itu. Aristoteles mengkritik Demokrasi dan Oligarki sebagai model pengelolaan kekuasaan sebagai fenomena sosial pada saat itu, bukan mendudukkannya sebagai diskursus yang saling beradu gagasan sebagaimana yang dilakukan oleh ilmu pengetahuan hari ini.

Saya tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi, namun para pemuja Demokrasi seolah berfikir bahwa Demokrasi adalah bentuk kekuasaan paling ideal tentang negara. Demokrasi dipuja sebagai sesuatu yang merepresentasikan keadilan sosial. Bahkan Demokrasi dijadikan slogan perjuangan dan pembelaan atas hak-hak sipil. Ini sungguh bentuk pemujaan berlebihan terhadap Demokrasi.

Bahkan semua buku dan literatur hari ini yang membahas tentang pemerintahan menjadikan Demokrasi sebagai diskurusus tentang model kekuasaan yang lebih modern dari model pemerintahan Aristoteles.

Maka dari itu, mendudukan Demokrasi sebagai model kekuasaan yang dikritik oleh Aristoteles adalah upaya saya untuk menjelaskan hal yang sebenarnya. Agar kita semua bisa keluar dari salah satu penipuan terbesar dalam sejarah intelektual, yaitu mempercayai model transisi kekuasan yang dijelaskan oleh para pemikir rennaisance yang mengajarkan pola Monarki > Aristokrasi > Demokrasi.

Untuk memahami kritik Aristoteles terhadap Demokrasi, kita tidak boleh memisahkannya dari kerangka Etika Nikomakea, seperti yang dilakukan oleh pemikir pasca paripatetik sampai rennaisance atau sebagaimana literatur hari ini menjelaskan tentanng Aristoteles. Karena bagi Aristoteles, politik bukan sekedar teknik mengelola pemerintahan atau mengelola kekuasan negara, melainkan perwujudan etika pada level kognitif. Negara adalah sarana bagi manusia untuk mencapai eudaimonia – kehidupan bersama yang baik dan bermakna. Hal itu tidak dapat dicapai tanpa pengetahuan tentang sophia dan phronesis.

Dengan logika ini, maka Demokrasi menurut Aristoteles adalah konsep yang cacat secara epistemik, karena Demokrasi:

1. Menempatkan keputusan tertinggi di tangan massa yang tidak memiliki pengetahuan teoritis tentang kebaikan.

2. Menyamakan pendapat dengan pengetahuan, kuantitas jadi indikator kebenaran.

Dan inilah fenomena demokrasi kita hari ini. Para pemangku kebijakan adalah orang-orang yang menduduki jabatannya bukan karena mereka paham tentang sophia dan phronesis, tapi karrena terpilih dengan suara terbanyak. Serta kebenaran hari ini adalah apa yang paling banyak dipercayai, bukan karena ide bersesuaian dengan realitas.

Pada Demokrasi, pengetahuan tidak memiliki ruang. Setiap suara bernilai sama. Padahal tidak semua nalar memiliki kedalaman pengetahuan yang sama. Demokrasi adalah bentuk kekuasaan yang tidak memberikan tempat pada kebijaksanaan dan intelektualitas. Sehingga tidak heran, dalam setiap negara Demokrasi, inetelektualitas akan selalu berada di luar kekuasaan dan hanya mendapatkan tempat apabila intelektualitas itu dijadikan sebagai alat pelegitimasi kekuasaan.

Dalam pandangan Aristoteles, perbedaan Demokrasi dengan Oligarki hanya terletak pada model penindasannya. Oligarki secara terbuka menindas rakyat lewat kekuasaan dan harta, sedangkan demokrasi menindas nalar melalui kekuasaan atas jumlah. Keduanya tidak memberikan tempat pada kebaikan bersama, melainkan kepentingan kelompok, keluarga atau kelas sosialnya. Maka jangan heran kalau hari ini,

justru Oligarki dan Demokrasi kemudian bersatu dalam sistem negara modern. Oligarki adalah motif dan Demokrasi adalah sistem yang memenangkannya. Tidak ada Demokrasi hari ini yang tidak bermotifkan Oligarki.

Dalam kritiknya, Aristoteles menjelaskan beberapa poin yang menjadi kelemahan struktural dari Demokrasi, yaitu:

1. Tidak ada indikator kebajikan;

   Demokrasi menurut Aristoteles cenderung menganggap kebebasan sebagai tujuan tertinggi, bukan kebajikan. Padahal kebebasan tanpa ukuran kebajikan hanyalah bentuk baru dari anarki, yaitu masyarakat yang bebas tetapi kehilangan arah moral.

2. Dominasi emosi atas pengetahuan;

   Dalam Politics IV. 4. , Aristoteles menuliskan bahwa dalam Demokrasi, keputusan publik sering diambil berdasarkan hasrat sesaat, bukan deliberasi rasional. Rakyat mudah dipengaruhi oleh demagog (pemimpin politik yang memanipulasi emosi, prasangka, ketakutan publik untuk mendapatkan kekuasaan) yang menggunakan retorika untuk mempengaruhi massa demi kepentingan pribadi.

3. Relativisme kebenaran;

   Demokrasi menyamakan pendapat mayoritas dengan kebenaran umum. Padahal bagi Aristoteles, truth is not a matter of vote. Kebenaran tidak pernah dihasilkan oleh jumlah, tapi kesesuaian dengan akal.

4. Ketidaksdtabilan hukum;

   Kerena didorong oleh keinginan massa, Demokrasi mudah berubah menjadi bentuk ekstrimnya yaitu "Ochlocracy" (pemerintahan oleh kerumunan). Negara menjadi fluktuatif dan tidak stabil, mudah dikuasai populisme yang menjadi kebijakan publik serta kehilangan arah moral.

Satu hal yang harus dipahami dalam kritik Aristoteles, dimana Aristoteles tidak menolak partisipasi rakyat dalam pemerintahan, tapi Aristoteles ingin "akal" yang memimpih "kehendak". Sebuah hal yang disembunyikan oleh dunia hari ini tentang Aristoteles.

BAB III
MANUSIA ARISTOTELIAN DI ABAD INFORMASI

Krisis Subjek Rasional

Setiap teori tentang negara pada dasarnya berakar pada satu pertanyaan ontologis, siapakah manusia yang menjadi dasar negara itu? Maka perdebatan dua kutub besar sosiologi modern tentang Sistem vs Aktor sebenarnya adalah perdebatan telah lama selesai. Tidak ada sistem yang berjalan tanpa kendali manusia, walaupun sistem tersebut dibuat untuk mengatur/mengendalikan manusia yang lebih banyak. Manusia yang memegang kendali atas sistem adalah manusia yang menetukan gerak dan arah kemana sistem itu mengendalikan manusia yang lebih banyak. Ini tentang subjek yang mengendalikan masyarakat, dan dalam konteks negara, pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang siapa yang kepadanya kendali atas kehidupan bersama kita berikan.

Dalam tradisi Aristotelian, manusia bukan sekadar individu biologis, melainkan makhluk rasional yang

menemukan kesempurnaannya melalui kehidupan bersama. Politik, dalam pengertian ini, bukan mekanisme kekuasaan, melainkan wahana moral dimana rasionalitas manusia beroperasi untuk mencapai kebaikan bersama (to kalon). Oleh sebab itu, penekanan tentang keseimbangan antara pengetauan teoritis (sophia) dan kebijaksanaan praktis (phronesis) sebagai syarat mutlak Zoon Politikon yang mengendalikan masyarakat untuk mencapai tujuan kebaikan bersama, merupakan substansi yang kemudian menjelaskan mengapa keadilan, kesejahteraan atau ide-ide paling fundamental tentang masyarakat adalah hal yang rasional untuk dicapai dalam tradisi pemikiran Aristoteles. Karena masyarakat dipimpin oleh akal, bukan kepentingan ekonomi dalam bentuk oligarki.

Dalam tradisi empirisme, tentu saja hubungan sistem – aktor dalam ranah sosiologis hanya dilihat dalam hubungan administrasi dan interaksi di ranah material. Perdebatan ini pun bukanlah perdebatan tentang apakah masyarakat merupakan evolusi dari kesadaran ontologis manusia. Hubungan dalam ranah ini melihat manusia sebagai komponen dalam sebuah mesin besar bernama masyarakat.

Maka dari itu, akar perdebatan dalam diskursus sosilogis dari klasik sampai modern, adalah perdebatan tentang apakah sistem yang kemudian mengendalikan aktor atau aktor adalah subjek yang lebih superior dan mengendalikan sistem.

Perdebatan ini membuat setiap teori yang keluar tentang bagaimana hubungan sistem – aktor dalam diskursus sosilogi modern seolah dibentuk hanya untuk berpihak pada salah satu standing dalam perdebatan besar tersebut. Padahal perdebatan itu lahir dari kekeliruan melihat hubungan sistem dan aktor dalam masyarakat. Perdebatan yang tidak ujungnya sama, sama-sama melihat hubungan sistem -aktor sebagai hubungan materialisme mekanis.

Hari ini, revolusi teknologi informasi yang mempercepat gerak perubahan masyarakat, menyebabkan manusia mulai kritis terhadap fenomena sosial yang terjadi. Tapi bukan kritis yang hadir menjadi kesadaran reflektif akan posisi ontologisnya, melainkan kritis yang bertransformasi menjadi paradoks baru. Pengetahuan masyarakat bertambah dengan cepat, namun manusia kehilangan kesadaran akan hakikat ontologis-nya sebagai zoon logon echon. Manusia tetap berpikir, tetapi pikirannya tercerai-berai oleh arus data. Manusia tetap berinteraksi, tetapi interaksinya diatur oleh sistem yang ia ciptakan sendiri.

Arus modernisasi baru dalam bentuk transformasi digital hari ini, kemudian menyebabkan manusia yang seharusnya menjadi subjek rasional berubah menjadi subjek algoritmik. Mendorong manusia tidak lagi berpikir karena kehendaknya, melainkan karena karena intervensi sistem. Sehingga manusia

modern hari ini hidup dalam kontradiksi ontologis. Dimana manusia semakin berpengetahuan, tetapi semakin sulit memahami makna pengetahuannya.

Maka krisis manusia hari ini bukanlah krisis informasi, melainkan krisis makna. Dan ketika makna menghilang, negara kehilangan dasar moralnya, sebab negara yang kehilangan manusia rasional akan berubah menjadi mesin tanpa jiwa.

Ontologi Aristotelian tentang Manusia dan Nalar

Aristoteles menyatakan bahwa "manusia berbeda dari hewan karena memiliki logos" — kemampuan untuk menimbang, berbicara, dan berpikir tentang yang baik dan yang buruk. Maka manusia sebagai individu disebut zoon logon echon. Pengetahuan manusia yang berkembang menjadi kesadaran reflektif terhadap posisi ontologisnya dan hubunganya dengan manusia lain sebagai satu kesatuan realitas, kemudian melahirkan kesadaran akan kehidupan bersama. Maka dari itu, kehidupan bersama adalah keniscayaan natural manusia sebagai mahluk yang berakal dan lahir dari evolusi kesadarannya.

Dari sinilah konsep zoon politikon yaitu makhluk yang hanya dapat mencapai kebajikan melalui kehidupan bersama sebagaimana dimaksud oleh Aristoteles itu lahir. Masyarakat adalah akal

manusia yang berkembang dari kesadaran individu ke kesadaran akan kehidupan bersama. Artinya pada masyarakat kesadaran manusia bukan lagi kesadaran tentang pemenuhan kebutuhan fisik pribadi, namun kesadaran bahwa interaksi sosial yang terjadi haruslah diatur agar bisa mewujudkan hal-hal yang menjadi kebutuhan bersama.

Satu hal yang kemudian penting untuk dibahas adalah mengapa dalam literatur yang didasarkan pada perspektif empiris hari ini, akhirnya harus berujung pada pandangan yang sangat skeptis tentang keadilan dan kesejahteraan. Hal itu karena semua diskursus hari ini tentang negara, politik dan hukum tidak mendefinisikan manusia sebagai mahluk yang berpengetahuan. Sehingga design politik, sistem sosial atau hukum yang dibentuk tidak memberikan tempat pada pengetahuan dan kesadaran manusia. Kita bisa berasumsi bahwa teori kekuasan negara yang paling modern dan terasa paling rasional adalah teori tentang kontrak sosial. Tapi kita sendiri lupa, kontrak sosial itu harus diwujudkan dalam bentuk apa dan bagaimana? Siapa yang berkontrak dengan siapa? Apakah kontrak sosial itu pernah ada? Di negara mana? Karena faktanya adalah John Locke pun sebagai salah satu pemikir yang merumuskannya tidak berhasil menerapkannya di Inggris. Sampai hari ini Inggris masih berbentuk monarki.

Saya sampai hari ini pun, tidak percaya bahwa ada negara yang terbentuk dari kontrak sosial. Saya

tidak pernah menemukan dokumen atau literatur yang menyebutkan bahwa ada sekelompok orang yang bertandatangan dan bersepakat untuk membentuk negara. Faktanya, negara terbentuk dan berpisah sebagai sebagai gerak kesadaran manusia. Inggris memilih mempertahankan monarki dengan modifikasi sebagai sistem yang konstitusional karena kesadaran kolektif masyarakatnya. Begitupun Uni Soviet terpecah karena kesadaran rakyatnya. Negara adalah pilihan sadar, bukan dongeng tentang referendum.

Sebagai sebuah pilihan sadar, maka seharusnya hari ini manusia mengevaluasi kesadarannya. Agar kesadarannya bergerak dari kesadaran fungsional ke kesadaran ontologis. Tentang posisi manusia dan manusia lainnya sebagai dalam kerangka realitas. Manusia harus berfikir untuk mengaktifkan akalnya, karena zoon politikon harus dimulai dari zoon logon echon.

Bagi Aristoteles, politik bukan sekedar teknik mengelola kuasa atau memenangkan tahta, melainkan Politik adalah cabang dari etika. Ini sesungguhnya hal menarik, karena selama ini politik hanya didefinisikan sebagai bahasa kekuasaan. Isinya hanya transaksi dan negosiasi memenangkan pengendalian atas masyarakat. Definisi politik hari ini adalah definisi yang terlepas jauh dari moralitas.

Ketika Aristoteles menempatkan Politik setelah Etika Nikomakea, artinya menurut Aristoteles politik harus lahir dari pegetahuan, karena etika adalah cabang dari diskursus filsafat tentang aksiologi. Negara pun didefinisikan sebagai hasil logis dari kebutuhan manusia untuk mengaktualkan kebajikan melalui nalar kolektif. Sehingga dalam kerangka ini, manusia politik bukanlah individu yang tunduk kepada negara, melainkan entitas moral yang justru memberi legitimasi kepada negara melalui pikirannya.

Negara sejatinya hanya sah sejauh ia mencerminkan struktur rasionalitas manusia. Tetapi peradaban modern hari ini, mengubah struktur ini secara fundamental. Nalar yang dulu bersifat praktis dan etis (phronesis) bergeser menjadi teknis dan instrumental. Manusia tidak lagi berfikir untuk memahami, tetapi menghitung untuk menguasai. Akibatnya, logos yang seharusnya mempersatukan manusia kini justru memisahkan mereka. Komunikasi kehilangan fungsi deliberatifnya. Dialog hari ini sudah berubah dari interaksi sosial menjadi transmisi data.

Transformasi Rasionalitas di Era Modern

Perubahan paling mendasar dalam sejarah manusia bukanlah perubahan politik, tetapi pergeseran rasionalitas. Sejak Descartes, rasionalitas dipisahkan dari moralitas. sejak Bacon,

pengetahuan dipisahkan dari kebijaksanaan. Transformasi ini dalam sejarah epistemologi sebenarnya adalah konflik paradigmatik antara empirisme vs rasionalisme yang kemudian menciptakan krisis pengetahuan. Rasionalisme di tangan Descartes berubah menjadi pemujaan terhadap rasio sebagai esktrimitas pertama pasca rennaisance. Rasionalisme tidak memberikan tempat pada moralitas, etika dan nilai-nilai aksiologis lainnya. Rasionalisme yang terwujud dalam revolusi industri tidak hanya mengubah struktur sosial masyarakat, tapi juga mengubah sistem berfikir dimana yang tidak memiliki rasio, akan dikeluarkan dari pengertian manusia dan diposisikan sebagai alat, termasuk perempuan.

Saya tidak akan membahas secara panjang tentang konflik epistemologis ini, anda semua bisa membacanya dalam literatur yang khusus membahas itu. Namun, yang akan saya sampaikan kepada kalian semua adalah bahwa walaupun akhirnya konflik ini dimenangkan oleh Empirisme yang berhasil menjadi standarisasi sains modern, namun tercipta sintesis baru terhadap pengetahuan praktis di masyarakat. Sintesis yang memaksa rasionalitas tunduk pada kaidah empirisme, bisa diukur dan diperhitungkan. Sehingga konteks modernitas hari ini melahirkan definisi baru terhadap rasionalitas, bukan sebagai pengetahuan akan kesadaran dan nalar yang menciptakan kebijaksanaan praktis. Melainkan rasionalitas sebagai alat dominasi.

Hari ini, rasionalitas manusia tidak lagi menanyakan "apa yang baik? ", tetapi "apa yang efektif? ".

Kondisi inilah yang melahirkan apa yang Max Weber sebut instrumental rationality — rasionalitas yang kehilangan nilai. Habermas menyebut konsekuensi dari proses ini sebagai kolonialisasi dunia kehidupan (Lebenswelt). Rasionalitas komunikatif, yang memungkinkan manusia memahami dan dipahami, tergantikan oleh rasionalitas strategis yang hanya bertujuan menang. Kita berbicara bukan untuk menemukan kebenaran, tetapi untuk menundukkan lawan bicara. Dengan demikian, masyarakat kehilangan kemampuan deliberatif yang menjadi fondasi etika publik.

Foucault menyatakan bahwa di balik rasionalitas modern selalu tersembunyi relasi kekuasaan. Pengetahuan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang netral, karena telah menjadi bagian dari mekanisme pengendalian sosial. Dalam dunia seperti ini, nalar tidak lagi membebaskan manusia, tetapi mengikatnya pada struktur yang ia ciptakan sendiri.

Manusia Algoritmik: Krisis Ontologis Abad Informasi

Kita bisa saja menyebut bahwa saat ini kita berada di abad informasi. Sebuah masa dimana revolusi teknologi informasi telah memberikan perubahan signifikan terhadap cara pandang dan cara kita hidup sebagai individu, masyarakat dan negara. Kita mungkin bisa bangga bahwa kecepatan teknologi informasi saat ini berada di level yang belum pernah ada sebelumnya. Kita melahirkan generasi digital dan hampir seluruh interaksi kita berada dalam kecepatan yang sangat tinggi. Tapi kita tidak pernah sadar, bahwa revolusi teknologi tanpa arah hanya menciptakan sebuah krisis baru.

Hari ini, data menggantikan pengalaman, kecepatan menggantikan kedalaman, dan konektivitas menggantikan kebersamaan. Manusia modern hidup di tengah ilusi rasionalitas — seolah mengetahui segalanya karena memiliki akses terhadap informasi, padahal kehilangan kemampuan untuk membedakan antara pengetahuan dan kebisingan. Manusia kehilangan kemampuan untuk membedakan antara kepakaran dan populatiras. Manusia kehilangan kemampuan untuk membedakan antara fakta dan propaganda.

Manusia hari ini adalah manusia yang menjadikan dunia digital sebagai dunia baru. Mereka terjebak dalam ilusi alogaritma yang mereka sembah sebagai ruang publik yang paling netral. Seluruh

aktifitasnya sebagai manusia adalah tentang bagaimana mengejar validasi digital yang diukur bukan karena seberapa sadar akalnya, tapi seberapa banyak interaksi yang merespon tindakannya di ruang-runag digital. Kemanusiaan adalah tentang jumlah followers terbanyak dan kebenaran diukur lewat viralitas sesuatu.

Manusia digital adalah manusia yang selalu terhubung tetapi jarang hadir. Ia berbicara, tetapi tidak berdialog. Ia menilai, tetapi jarang memahami.

Ia bukan lagi zoon politikon, melainkan zoon algorithmikon. Yaitu makhluk yang eksistensinya dikurasi oleh sistem informasi yang bekerja lebih cepat daripada kesadarannya sendiri.

Hal ini tentu saja menciptakan krisis pada manusia algoritmik yang bersifat ganda:

- Ia kehilangan kebebasan epistemik karena pikirannya diarahkan oleh pola konsumsi digital.

- Ia kehilangan kebebasan moral karena keputusannya diambil bukan berdasarkan pertimbangan etis, tetapi tekanan sosial dan sistemik.

Maka dalam konteks ini, rasionalitas praktis Aristotelian bukan sekadar konsep klasik,

melainkan bentuk perlawanan terhadap dominasi algoritma. Konsep manusia sebagai zoon logon echon, konsep tentang masyarakat yang lahir dari evolsi kesadaran zoon politikon dan negara sebagai wadah bagi aktualnya akal kolektif adalah konsep paling rasional untuk mengembalikan makna manusia dan kemanusiaan itu sendiri.

Mungkin salah satu reaksi yang akan muncul ketika Teori Negara Moderator ini dilempar ke publik adalah ini hanya konsep dari seseorang yang mencoba menghidupkan kembali tradisi-tradisi klasik di masa-masa awal Yunani Kuno. Atau mungkin tuduhan sebagai Teori yang mengingkari modernitas. Saya tidak pernah menjadikan itu masalah, karena setiap diskursus akan mendapatkan kritik dan takdirnya masing-masing. Tapi satu hal yang harus kita sadari hari ini, bahwa dalam sistem negara yang diklaim paling modern pun hari ini, masih ada manusia yang susah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Masih ada manusia yang terjebak diantara harga-harga yang mahal. Masih ada manusia yang mengemis keadilan. Masih ada manusia yang makan satu kali sehari.

Lalu kalau setiap pandangan paling modern tentang negara hari ini tidak bisa menjawab itu, bukankah ini waktunya kita mempertanyakan alasan kita yang paling fundamental tetang negara?

Bahwa apakah memang sistem negara modern hari ini betul-betul dibuat untuk kebaikan bersama, atau ternyata negara modern adalah negara yang menggunakan demokrasi sebagai topeng untuk menyembunyikan oligarki?

Karena semakin kemanusiaan diukur melalui indikator dan angka-angka digital, maka ontologi bukan lagi sesuatu yang penting untuk dipikirkan. Dan makna individu, masyarakat dan negara harus terdegradasi pada titik terendah. Dimana individu, masyarakat dan negara diukur melalui alogaritma digital yang terlalu manipulatif.

Di posisi ini, jangan pernah lagi bertanya tentang keadilan, kesejahteraan dan moralitas. Itu hanya terminologi klasik yang tercatat dalam naskah-naskah para filsuf klasik. Kita tidak akan menemukannya dalam data dan alogaritma.

Manusia Sebagai Fondasi Negara Moderator

Negara Moderator hanya mungkin dibangun di atas manusia yang moderat secara rasional dan moral. Moderasi, dalam pengertian Aristotelian, adalah keutamaan (aretē) yang berada di antara dua ekstrem yaitu kekurangan dan kelebihan. Tetapi keutamaan tidak pernah muncul secara otomatis, melainkan ia adalah hasil dari latihan nalar dan disiplin moral.

Dalam konteks politik, moderasi berarti kemampuan untuk menyeimbangkan kehendak dan kebijaksanaan. Dalam konteks negara, berarti kemampuan menyeimbangkan pusat dan daerah, kekuasaan dan kebenaran, efisiensi dan etika. Namun keseimbangan ini tidak akan pernah tercapai jika subjek yang membentuk negara sendiri kehilangan keseimbangannya.

Maka negara hanya seimbang sejauh manusia yang mengisinya rasional. Dan manusia hanya rasional sejauh ia mampu menggunakan akalnya bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk memahami. Di sinilah prinsip dasar Negara Moderator menemukan fondasinya:

"sebuah negara yang dibangun bukan di atas kekuasaan, melainkan di atas rasionalitas manusia yang sadar akan batas dan tanggung jawabnya. "

Abad informasi memaksa kita untuk meninjau ulang pengertian kita tentang manusia. Kita harus keluar dari paradigma yang melihat manusia sebagai objek sistem, dan kembali kepada pemahaman Aristotelian bahwa manusia adalah subjek rasional yang memiliki tujuan moral. Tanpa rehabilitasi konsep manusia, teori apa pun tentang negara hanya akan menjadi bangunan kosong.

Manusia dalam tradisi Aristotelian adalah manusia yang berpikir dalam kerangka kebajikan. Manusia memahami bahwa nalar bukan sekadar alat logika,

tetapi juga wadah bagi kesadaran moral. Manusia adalah entitas yang sadar bahwa berpikir adalah tindakan etis, bukan sekadar proses mental.

Oleh karena itu, Teori Negara Moderator hanya dapat lahir dari manusia jenis ini. Manusia yang menemukan kebebasannya dalam berpikir dan menegakkan kebajikannya melalui nalar. Manusia yang menyeimbangkan antara sophia dan phronesis. Manusia yang paham bahwa negara haruslah menjadi wadah akutalitas bagi eudaimonia. Karena tanpa manusia yang rasional dan bermoral, negara akan terus kehilangan keseimbangannya, betapa pun indahnya konstitusi yang ditulis atas namanya.

BAB IV
KEKUASAAN, PENGETAHUAN, DAN KEBISINGAN

Kekuasaan Sebagai Masalah Pengetahuan

Kekuasaan dan pengetahuan selalu berjalan beriringan. Namun dalam sejarah modern, keduanya tidak lagi saling melengkapi, melainkan saling memanipulasi. Kekuasaan tidak lagi mengandalkan legitimasi rasional, tetapi mengendalikan arus pengetahuan untuk menciptakan persepsi yang menguntungkan dirinya.

Sebaliknya, pengetahuan tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pembebasan, melainkan sebagai alat legitimasi bagi kekuasaan. Foucault mengingatkan bahwa setiap rezim kebenaran adalah juga rezim kekuasaan; bahwa pengetahuan yang dianggap benar selalu lahir dari struktur kekuasaan yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dipikirkan.

Dalam konteks modern, logika ini bekerja bukan hanya di institusi negara, tetapi juga dalam sistem informasi global. Kekuasaan kini tidak menindas melalui larangan, tetapi melalui produksi informasi yang berlebihan — sebuah paradoks di mana kebebasan menjadi bentuk baru dari kontrol. Oleh karena itu, untuk memahami krisis moderasi dalam politik kontemporer, kita harus menelaah ulang hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Sebab di titik inilah nalar publik kehilangan keseimbangannya: ketika berpikir bukan lagi kegiatan rasional, tetapi proses konsumsi persepsi.

Saat ini bahkan krisis tentang kekuasaan dan pengetahuan mendapatkan bentuknya yang paling baru. Hadirnya cryptocurrency sebagai bentuk ekonomi baru dalam dunia digital akhirnya menciptakan sintesis baru antara kekuasaan dan pengetahuan. Crypto yang tadinya merupakan bentuk perlawanan terhadap ekonomi konvensional yang sangat bergantung pada otoritas dan mendapatkan penerimaannya karena perkembangan nalar kritis untuk menentang dominasi kuasa yang mengendalikan sistem, akhirnya berubah menjadi bentuk penjajahan baru dan agama baru.

Crypto sebagai ekonomi digital diklaim oleh pemujanya sebagai perlawanan terhadap intervensi kuasa yang menentukan nilai uang. Sehingga crypto sebagai jenis curency baru dalam dunia digital mendapatkan kepercayaannya karena berhasil

menghadirkan definisi baru bagi kepercayaan. Bahwa kepercayaan seharusnya bisa dibangun oleh logika matematika, bukan monopoli lembaga. Tidak ada sentralisasi pasar, yang ada hanyalah desentralisasi murni hasil konsensus pasar.

Artinya aset crypto sangat bergantung dari kepercayaan pasar sebagai validitas atas nilainya. Semakin pasar percaya, maka akan semakin tinggi nilai dari aset digital tersebut. Tapi fenomena ini juga memperlihatkan wajahnya yang lain. Bahwa sesuatu yang hanya disandarkan pada konsensus – bukan otoritas – memiliki tingkat relativitas yang sangat tinggi. Kepercayaan sebagai konsensus adalah sesuatu yang sangat rapuh dan bahkan bisa berubah dalam hitungan detik hari ini.

Kepercayaan yang dibangun atas konsensus pasar diklaim sebagai bentuk ekonomi paling demokratis hari ini, namun juga menunjukkan bahwa hal tersebut meninggalkan celah epistemik yang sangat besar. Celah yang akhirnya menjadi pertanyaan, kalau ternyata crypto sebagai aset digital akhirnya hadir sebagai komoditi yang diperjual belikan, bagaimana cara untuk menjaga kepercayaan agar nilainya stabil?

Ternyata hari ini, crypto hanya hadir sebagai bentuk ilusi baru sebagai evolusi dari ilusi lama yaitu uang. Kepercayaan yang diklaim merupakan validitas nilai dari aset digital sesungguhnya adalah konsensus alogaritmik yang tetap harus dijaga

stabilitasnya. Maka dari itu, semua pengendali proyek yang berada di balik setiap aset digital akan berusaha tetap menjaga kepercayaan masyarakat sehingga aset digital itu bisa tetap terjaga nilainya dan orang-orang masih akan berinvestasi ke aset tersebut. Kondisi ini memaksa para crypto elite harus menjadi produsen narasi-narasi yang tidak lagi menjelaskan aspek fundamental mengapa proyek yang berada di balik aset digital harus dipercaya. Narasi yang hadir hari ini lebih kepada eksploitasi mimpi tentang kebebasan finansial bagi kelas investor awam. Sasaran crypto berubah dari investor kepas atas ke masyarakat kelas bawah yang ingin cepat kaya.

Akhirnya, hari ini aset digital bukan lagi bentuk perlawanan terhadap sistem ekonomi konvensional, melainkan telah bertransformasi menjadi pasar yang menjadikan kepercayaan sebagai komoditi baru. Yang akan selalu mendapatkan kepercayaan dari mereka yang punya mimpi tentang kebebasan finansial untuk dieksploitasi. Dan satu hal penting, apabila kepercayaan telah berubah menjadi komoditi di pasar digital, sebagai komoditi ia tetap saja memiliki empat kemungkinan: dapat dikumpulkan, dapat diperdagangkan, dapat dimanipulasi dan dapat dikorupsi.

Yang menentukan nilai komoditi kepercayaan adalah mereka yang mengendalikan sistem, pemilik kepentingan proyek atau pembuat narasi. Sintesis baru antara kekuasaan dan pengetahuan yang

melahirkan kepercayaan baru yaitu ilusi teokrasi alogaritmik.

Epistemologi Kekuasaan dalam Tradisi Aristotelian

Maka dari itu, ketika kekuasaan dijalankan tanpa kesadaran ontologis dan etis, ketika pengetahuan tidak lagi hadir sebagai guru yang mengajarkan kebijaksanaan, tetapi menjadi alat pelegitimasi kekuasaan, maka membedah kembali ide paling fundamental tentang kekuasaan dan pengetahuan adalah upaya untuk mengembalikan kekuasaan dan pengetahuan ke makna yang sebenarnya.

Aristoteles dalam filsafatanya tidak melihat kekuasaan (dynamis) sebagai sesuatu yang niscaya jahat. Melainkan ia adalah potensi (potentiality) yang dapat menjadi baik atau buruk tergantung pada bagaimana ia diaktualkan melalui kebajikan (aretē).

> *"Kekuasaan sejati bukan terletak pada kemampuan memaksa, tetapi pada kemampuan menata kehidupan bersama melalui nalar."*

Sehingga kekuasaan dalam pengertian ini, bersifat teleologis dan memiliki tujuan moral. Moralitas menjadi tujuannya, etika menjadi pengetahuannya serta politea adalah tujuan akhirnya. Kekuasaan

yang baik adalah kekuasaan yang rasional — yang tunduk kepada prinsip kebaikan bersama (to agathon koinon). Ketika kekuasaan melepaskan diri dari rasionalitas etisnya, ia berubah menjadi dominasi. Dan ketika pengetahuan melepaskan diri dari tujuan moralnya, ia berubah menjadi manipulasi.

Berdasarkan ini maka jelas Aristoteles bukan orang yang menolak kuasa atau bahkan melihat kuasa dari perspektif yang negatif sejak awal. Aristoteles melihat kuasa sebagai sebuah keniscayaan bahwa dalam kehidupan bersama, kekuasaan itu perlu untuk mengatur dan mengarahkan. Tanpa kekuasaan hukum tidak bisa berlaku. Tanpa kekuasan tidak akan tercipta stabilitas. Tanpa kekuasaan hanya akan melahirkan anarkisme. Kekuasaan adalah medium netral yang bergantung pada manusia yang memegang dan mengendalikannya.

Sehingga menurut Aristoteles, bentuk pemerintahan yang ideal bukan yang tanpa kekuasaan, tetapi yang kekuasaannya diatur oleh kebajikan. Dengan demikian, hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan seharusnya bersifat simbiotik moral, dimana pengetahuan membimbing kekuasaan agar tidak menyimpang, dan kekuasaan menjamin pengetahuan agar dapat bekerja untuk kebaikan publik.

Namun modernitas menghancurkan simbiosis ini. Kekuasaan menjadi otonom dari pengetahuan, dan pengetahuan menjadi otonom dari moralitas. Dari pemisahan inilah lahir krisis politik modern — kekuasaan tanpa kebijaksanaan, dan pengetahuan tanpa tanggung jawab.

Mekanisme Distorsi: Dari Nalar ke Narasi

Krisis ini menjadi semakin dalam di abad informasi, ketika kekuasaan tidak lagi beroperasi melalui kontrol langsung, tetapi melalui mekanisme distorsi epistemik. Rasionalitas publik tidak lagi dibentuk oleh argumen, tetapi oleh narasi.

Kebenaran tidak ditentukan oleh isi, melainkan oleh intensitas penyebarannya. Fenomena ini menandai perubahan mendasar dalam struktur kekuasaan: dari regime of authority menuju regime of attention. Jika di masa lalu kekuasaan menguasai melalui hukum dan lembaga, kini ia menguasai melalui opini dan visibilitas. Dalam kerangka Aristotelian, ini adalah bentuk inversi nalar politik. Yang seharusnya menjadi deliberasi rasional (logos politikos) berubah menjadi konsumsi emosional.

Ruang publik yang dulu menjadi arena perdebatan gagasan kini menjadi pasar pengakuan diri. Dan di pasar itulah lahir bentuk baru kekuasaan, yaitu kekuasaan yang bekerja melalui kebisingan. Kebisingan publik adalah bentuk mutakhir dari

dominasi. Ia meniadakan kemampuan berpikir bukan dengan melarang, tetapi dengan menenggelamkan. Kekuasaan tidak perlu membungkam kebenaran, cukup membuatnya tidak terdengar. Inilah paradoks modernitas, semakin bebas manusia berbicara, semakin sulit ia mendengarkan.

Ekonomi Perhatian dan Ilusi Demokrasi

Fenomena ini menciptakan apa yang disebut para teoritikus komunikasi sebagai ekonomi perhatian. Dalam sistem ini, nilai suatu ide tidak lagi ditentukan oleh kedalaman, tetapi oleh kemampuan menarik perhatian. Viralitas menjadi kunci di masa ini dan popularitas adalah indikator kemanusiaan baru. Politik berubah menjadi produksi citra, dan ruang publik menjadi kompetisi visibilitas. Demokrasi yang seharusnya berakar pada rasionalitas deliberatif (Habermas) berubah menjadi demokrasi performatif, yaitu demokrasi yang hidup dari simbol, bukan substansi.

Warga negara tidak lagi berpartisipasi untuk mencari kebenaran bersama, tetapi untuk mempertahankan identitas kelompoknya. Dengan demikian, public reason digantikan oleh public emotion. Kebijakan publik bahkan tidak lagi tentang bagaimana mengelola sumber daya alam, tapi kebijakan publik adalah bagaimana memproduksi isu populis sebagai modal politik

untuk pemilu berikutnya. Parlemen diisi oleh mereka yang terkenal, bukan mereka yang mengerti kebijaksanaan. Retorika dan penampilan adalah kombinasi utama yang bisa memenangkan perhatian rakyat. Rakyat memuja karena citra, dan membenci karena propaganda. Demokrasi pun hanya sebatas slogan perjuangan mahasiswa untuk mendapatkan atensi elite.

Aristoteles telah memperingatkan bahwa setiap kelebihan akan berubah menjadi kekurangan. Kebebasan yang berlebihan tanpa nalar akan melahirkan bentuk baru dari tirani. Hari ini tirani yang hadir bukan tirani penguasa, tetapi tirani opini. Dan dalam tirani opini, kekuasaan tidak lagi berada di tangan mereka yang bijak, melainkan di tangan mereka yang paling keras berbicara.

Ketika kekuasaan dikendalikan oleh narasi dan perhatian, kemampuan negara untuk memoderasi dirinya sendiri menjadi lumpuh. Kebijakan tidak lagi lahir dari keseimbangan rasional antara pusat dan daerah, antara efisiensi dan keadilan, melainkan dari reaksi terhadap tekanan opini publik yang bising.

Dalam struktur seperti ini, negara kehilangan fungsi epistemiknya. Ia berhenti menjadi wasit antara kepentingan dan berubah menjadi aktor dalam panggung kebisingan. Kekuasaan yang seharusnya menjaga nalar publik justru menjadi bagian dari keramaian itu sendiri.

Moderasi negara tidak mungkin dicapai jika struktur kekuasaan tunduk kepada logika ekstremitas. Negara hanya dapat menjadi moderator ketika ia berani mengambil jarak dari kebisingan publik — bukan untuk menjauh dari rakyat, tetapi untuk menjaga rasionalitas publik dari histeria kolektif. Dan ini hanya mungkin jika kekuasaan kembali berakar pada pengetahuan, bukan pada popularitas.

Pengetahuan Sebagai Dasar Otoritas Rasional

Kekuatan sejati negara tidak terletak pada monopoli kekuasaan, melainkan pada otoritas rasional yang lahir dari pengetahuan dan kebajikan. Otoritas yang rasional tidak memaksa, melainkan meyakinkan. Tidak menundukkan, melainkan menerangi.

Aristoteles menyebutnya epistēmē politikē — ilmu tentang bagaimana menata kehidupan bersama berdasarkan kebijaksanaan praktis.

Negara Moderator adalah konsep yang menempatkan pengetahuan sebagai dasar kekuasaan dan kebijaksanaan sebagai batasnya.

Dalam kerangka ini, birokrasi bukan sekadar alat pelaksana, tetapi mekanisme penjamin rasionalitas keputusan publik. Kekuasaan yang tidak berakar

pada pengetahuan akan menghasilkan kebijakan yang reaktif dan pengetahuan yang tidak diarahkan oleh kebajikan akan melahirkan teknokrasi tanpa jiwa. Hanya dalam keseimbangan keduanya, negara dapat memerintah dengan nalar.

Kekuasaan dan pengetahuan adalah dua sisi dari satu koin, keduanya menentukan bagaimana manusia menata dunianya. Krisis modernitas menunjukkan bahwa pemisahan keduanya hanya akan melahirkan ekstremitas, yaitu kekuasaan yang buta dan pengetahuan yang hampa.

Teori Negara Moderator menawarkan jalan ketiga. Jalan yang menyatukan kembali kekuasaan dan pengetahuan di bawah prinsip moderasi. Moderasi dalam kekuasaan berarti keberanian untuk mengambil jarak dari suara mayoritas ketika suara itu tidak lagi rasional.

Moderasi dalam pengetahuan berarti kesediaan untuk menundukkan nalar kepada kebajikan ketika logika saja tidak cukup. Di antara keduanya, negara menemukan keseimbangannya: kekuasaan yang berpikir, dan pengetahuan yang berjiwa.

BAB V
INSTITUSI DAN RASIONALITAS KOLEKTIF: STRUKTUR NEGARA SEBAGAI SISTEM MODERASI

Negara Sebagai Mekanisme Rasionalitas

Negara tidak lahir dari kebetulan sejarah, tetapi dari kebutuhan rasional manusia untuk menata kehidupan bersama. Bagi Aristoteles, negara (polis) adalah bentuk tertinggi dari komunitas moral, yaitu tempat di mana manusia dapat mengaktualkan kebajikannya melalui struktur rasional yang mengatur tindakan kolektif. Dengan demikian, negara adalah institusi rasionalitas kolektif, bukan sekadar organisasi kekuasaan.

Namun modernitas memisahkan rasionalitas dari institusi. Negara tidak lagi dipahami sebagai ekspresi kebijaksanaan publik, tetapi sebagai mesin administratif yang bekerja menurut logika efisiensi.

Dimana yang terjadi adalah birokrasi menggantikan deliberasi, prosedur menggantikan kebajikan. Akibatnya, rasionalitas negara menjadi parsial. Efisien secara teknis, tetapi lumpuh secara moral.

Negara Moderator hadir untuk mengembalikan fungsi epistemik negara, yakni sebagai wadah di mana rasionalitas individu ditransformasikan menjadi kebijaksanaan kolektif. Ia tidak sekadar mengelola kewenangan, melainkan memoderasi nalar publik agar keputusan politik lahir dari keseimbangan antara logika dan etika, antara pusat dan daerah, antara kehendak dan kebijaksanaan.

Ontologi Institusi: Dari Alat Kekuasaan ke Struktur Kebajikan

Dalam filsafat politik Aristotelian, institusi bukan instrumen, melainkan bentuk aktual dari kehidupan moral. Setiap lembaga negara adalah manifestasi dari nilai yang ia wakili. Pengadilan merepresentasikan keadilan, parlemen mewakili rasionalitas deliberatif, eksekutif mewujudkan kehendak rasional untuk bertindak. Ketika institusi kehilangan nilai yang mendasarinya, ia berubah menjadi struktur kosong yang hanya mempertahankan dirinya sendiri.

Modernitas menjadikan institusi kehilangan kesadarannya. Ia diukur dari produktivitas, bukan

dari kebajikan. Negara menjadi korporasi, warga menjadi konsumen, kebijakan menjadi produk.

Inilah bentuk paling halus dari dehumanisasi politik. ketika struktur yang seharusnya melayani manusia justru memaksa manusia menyesuaikan diri dengannya.

Negara Moderator memulihkan posisi institusi sebagai ruang moral-rasional. Dalam paradigma ini, setiap lembaga harus berfungsi sebagai mekanisme moderasi untuk menyeimbangkan antara kepentingan partikular dan kebaikan umum, antara efisiensi dan kebijaksanaan, antara inovasi dan kontinuitas. Institusi bukan sekadar alat kekuasaan, tetapi struktur kebajikan yang hidup.

Rasionalitas Kolektif: Antara Pusat dan Daerah

Rasionalitas kolektif negara tidak bersifat tunggal, melainkan polifonik. Ia lahir dari interaksi antara berbagai pusat nalar yaitu pusat negara, daerah, masyarakat sipil, dan individu warga.

Kesalahan besar sistem politik modern — termasuk apa yang terjadi dalam konteks negara kesatuan — adalah menganggap pusat sebagai satu-satunya sumber rasionalitas.

Dalam Negara Moderator, pusat dan daerah bukan hierarki, melainkan dialog. Pusat memegang otoritas integratif, bukan dominatif. Pusat menjaga arah moral dan kesatuan visi kebangsaan, sementara daerah menjalankan otonomi adaptif yang menyesuaikan prinsip universal dengan konteks lokal.

Struktur semacam ini membutuhkan sistem nalar ganda berupa:

1. Rasionalitas vertikal, yang menjamin kesatuan visi, norma, dan tujuan negara.

2. Rasionalitas horizontal, yang menjamin partisipasi dan keadilan dalam pelaksanaan kekuasaan.

Ketika keduanya bekerja dalam keseimbangan, negara menjadi tubuh yang hidup, dimana pusat berpikir, daerah bergerak, dan keduanya saling mengoreksi dalam irama moral dan kebajikan kolektif.

Institusionalisasi Moderasi

Moderasi tidak dapat dijaga hanya oleh niat moral, melainkan harus dibangun dalam struktur. Karena itu, Negara Moderator menghadirkan mekanisme institusional moderasi bukan hanya sekadar

lembaga baru, melainkan sebagai cara berpikir baru tentang bagaimana lembaga bekerja.

Ada tiga prinsip dasar dalam institusionalisasi moderasi:

- Prinsip Rasionalitas Terbuka

  Setiap lembaga harus membuka ruang refleksi publik terhadap dasar-dasar keputusannya. Legitimasi tidak hanya berasal dari prosedur hukum, tetapi juga dari koherensi rasional keputusan dengan nilai kebajikan publik.

- Prinsip Keseimbangan Wewenang

  Otonomi lembaga dijaga, tetapi selalu diikat oleh prinsip koordinatif, bukan subordinatif. Lembaga pusat bukan pengendali, melainkan penjaga keseimbangan. Ini berbeda dari konsep trias politica klasik yang memposisikan pusat di puncak hierarki kewenangan. Negara Moderator lebih menyerupai network of reasoning, bukan piramida kekuasaan.

- Prinsip Refleksivitas Institusional

  Setiap lembaga harus memiliki mekanisme koreksi internal berbasis nalar, bukan sekadar audit administratif yang bisa

> dimanipulasi. Birokrasi tidak hanya dievaluasi atas hasil, tetapi juga atas rasionalitas dan kebijaksanaan prosesnya. Kebijakan publik harus merefleksikan realitas dan menjadi solusi atas permasalahan rakyat. Pemerintahan dianggap berhasil ketika masyarakat telah sampai pada kesadaran akan kemanusiaan.

Dengan demikian, Negara Moderator membangun bukan hanya sistem kontrol, tetapi ekosistem berpikir di dalam tubuh negara.

Negara Sebagai Entitas Epistemik

Negara pada hakikatnya adalah organisme pengetahuan. Ia berpikir melalui kebijakannya, berbicara melalui regulasinya, dan bertindak melalui aparaturnya. Setiap kebijakan adalah pernyataan epistemik tentang bagaimana negara memahami realitas sosialnya.

Ketika negara salah berpikir, kebijakannya akan salah arah. Karena itu, fungsi utama negara bukan hanya menegakkan hukum, tetapi menjaga validitas nalar kolektif.

Negara yang kehilangan kemampuan berpikir rasional akan terjebak pada dua ekstrem:

1. Birokrasi yang mekanis, atau

2. Populisme yang impulsif.

Negara Moderator menolak keduanya. Ia menegaskan bahwa berpikir adalah fungsi utama kekuasaan. Keputusan negara harus lahir dari dialektika antara pengetahuan dan kebajikan. Dengan demikian, negara bukan sekadar "alat kekuasaan", tetapi subjek rasional yang sadar akan batas dan tujuannya.

Negara Sebagai Sistem Moderasi Rasional

Krisis institusional yang kita saksikan hari ini — korupsi, stagnasi birokrasi, ketidakpercayaan publik — bukan sekadar masalah moral individu. Ia adalah gejala epistemik, yaitu kegagalan struktur untuk memelihara rasionalitasnya sendiri. Ketika lembaga berhenti berpikir, ia mulai membusuk dari dalam.

Hari ini, institusi kehilangan legitimasi bukan karena rakyat memberontak, tetapi karena nalar publik tidak lagi melihat koherensi antara kata dan tindakan negara. Rasionalitas publik menuntut kesesuaian antara ide dan praksis. Tanpa keduanya, negara kehilangan kepercayaan, yang merupakan bentuk tertinggi dari delegitimasi rasional.

Negara Moderator harus memulihkan fungsi reflektif setiap lembaga agar negara dapat berpikir tentang dirinya sendiri. Refleksivitas bukan tanda

kelemahan, tetapi tanda kedewasaan rasional. Negara yang berani mengoreksi dirinya adalah negara yang sudah melampaui ego kekuasaan dan masuk ke ranah kebijaksanaan.

Negara yang adil tidak dibangun di atas keseimbangan kekuatan, tetapi di atas keseimbangan nalar. Dimana institusi adalah organ dari rasionalitas kolektif. Jika satu organ berhenti bekerja, keseluruhan tubuh akan lumpuh.

Negara Moderator hadir untuk memastikan bahwa setiap organ tetap hidup, berpikir, dan bekerja dalam irama kebajikan bersama. Dengan demikian, negara bukan entitas yang berjarak dari rakyat, melainkan struktur yang berpikir bersama rakyat.

Rasionalitas kolektif negara bersumber dari manusia rasional yang mengisinya dan diarahkan oleh kebajikan yang dihayatinya. Ketika moderasi menjadi prinsip struktural, negara akan selalu mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah, dan berubah tanpa kehilangan makna.

Negara Moderator bukanlah negara yang sempurna, melainkan negara yang sadar akan ketidaksempurnaannya dan terus berupaya menyeimbangkan nalar, kekuasaan, dan kebajikan.

Karena berpikir adalah satu-satunya cara agar negara tetap hidup sebagai kesadaran kolektif yang berakal.

BAB VI
MODERASI SEBAGAI PRINSIP ONTOLOGIS KEKUASAAN: DARI ETIKA KE STRUKTUR NEGARA

Moderasi Sebagai Keberadaan, Bukan Sikap

Dalam perdebatan politik kontemporer, kata moderasi sering disalahpahami sebagai sikap kompromistis — seolah moderat berarti tidak berpihak, tidak tegas, atau tidak ideologis. Padahal dalam kerangka filsafat Aristotelian, moderasi bukan sikap, melainkan modus keberadaan akal.

Satu hal yang perlu kita pahami, bahwa moderasi adalah manifestasi akal di realitas. Berupa keadaan ketika kekuasaan, pengetahuan, dan moralitas saling mengoreksi agar tidak jatuh ke ekstremitas. Dengan demikian, moderasi bukan pilihan politik, melainkan syarat ontologis bagi bertahannya negara dan rasionalitas manusia.

Sama halnya seperti tubuh yang memerlukan keseimbangan antara panas dan dingin untuk

hidup, negara memerlukan keseimbangan antara pusat dan daerah, antara kebebasan dan keteraturan, antara efisiensi dan keadilan. Tanpa keseimbangan itu, negara akan kehilangan usia-nya dan esensi keberadaannya sebagai makhluk moral-rasional.

Ontologi Moderasi dalam Filsafat Aristotelian

Dalam Etika Nikomakea, Aristoteles menyebut mesotes, yaitu keutamaan yang berada di tengah dua ekstrem sebagai inti dari kebajikan. Tetapi mesotes bukan kompromi matematis antara dua titik, melaikan keseimbangan dinamis yang diatur oleh nalar praktis (phronesis).

Dengan demikian moderasi, adalah tindakan rasional yang menempatkan segala sesuatu pada takarannya yang tepat.

Ketika prinsip ini diterapkan pada kekuasaan, kita menemukan bahwa kekuasaan yang benar adalah kekuasaan yang moderat. Ia tidak berlebihan hingga menjadi tirani, dan tidak kekurangan hingga menjadi anarki. Kekuasaan yang kehilangan moderasi akan kehilangan legitimasi, karena ia melanggar hukum kodrat rasionalm bahwa segala yang ekstrem cenderung merusak dirinya sendiri.

Maka, dalam pengertian Aristotelian, moderasi adalah hukum ontologis kehidupan bersama. Ia bukan norma yang diciptakan negara, tetapi prinsip yang memungkinkan negara ada. Sebagaimana nalar manusia membutuhkan keseimbangan untuk berpikir, kekuasaan membutuhkan moderasi untuk bertahan.

Dari Etika ke Ontologi Kekuasaan

Etika adalah refleksi individu atas tindakan baik, sedangkan ontologi adalah pemahaman tentang keberadaan itu sendiri. Ketika Aristoteles berbicara tentang mesotes, ia tidak hanya membicarakan moral pribadi, tetapi juga struktur realitas moral yang bekerja di dalam dunia. Moderasi, dalam konteks ini, adalah hukum eksistensial yang mengatur bagaimana kebaikan dapat bertahan di dunia yang bergerak.

Jika dalam etika pribadi, moderasi menjaga agar manusia tidak dikuasai oleh hasrat, maka dalam politik, moderasi menjaga agar negara tidak dikuasai oleh kekuasaan itu sendiri. Moderasi adalah mekanisme ontologis yang menahan energi kekuasaan agar tetap rasional. Tanpa moderasi, kekuasaan akan menghancurkan objek yang ia kuasai, termasuk dirinya sendiri.

Dari sini, kita sampai pada prinsip utama Negara Moderator:

"Bahwa kekuasaan hanya sah sejauh ia memoderasi dirinya sendiri. "

Inilah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan politik: kekuasaan yang memiliki kesadaran reflektif untuk membatasi dirinya, bukan karena tekanan luar, tetapi karena kesadaran dalam.

Dialektika Kekuasaan dan Moderasi

Kekuasaan dan moderasi berada dalam hubungan dialektis. Kekuasaan tanpa moderasi menjadi kekerasan dan moderasi tanpa kekuasaan menjadi kelemahan. Negara membutuhkan keduanya sebagaimana tubuh membutuhkan otot dan tulang: kekuatan untuk bergerak dan struktur untuk menahan arah.

Dalam struktur negara modern hari ini, ekstremitas kekuasaan muncul dalam dua bentuk:

1. Tirani. Terwujud ketika kekuasaan terpusat tanpa koreksi moral.

2. Populis. Terwujud ketika kekuasaan kehilangan pusat dan larut dalam tekanan opini.

Negara Moderator menolak kedua ekstrem ini dengan memposisikan kekuasaan sebagai fungsi

nalar, bukan hasrat. Kekuasaan yang rasional selalu menyadari keterbatasannya; ia tahu kapan harus bertindak, dan kapan harus menahan diri.

Dalam logika Aristotelian, moderasi bukan negasi terhadap ekstremitas, melainkan aktualitas dari keseimbangan. Ia bukan menolak energi kekuasaan, melainkan menata energinya agar bekerja dalam orbit kebajikan. Negara yang moderat bukan negara yang lemah, tetapi negara yang kuat karena sadar arah dan batas.

Moderasi Sebagai Prinsip Konstruktif Negara

Dalam Negara Moderator, negara tidak didefinisikan sebatas organisasi politik, melaikan sebagai mekanisme moral yang dibangun dari prinsip rasionalitas manusia. Maka dari itu, prinsip yang bekerja di dalam diri manusia juga berlaku di dalam struktur negara sebagai konsekuensi transformasi zoon logon echon menjadi zoon politicon. Dimana ketika manusia harus menyeimbangkan kehendak dan akal agar menjadi bijak, maka negara harus menyeimbangkan kekuasaan dan kebajikan agar menjadi adil.

Maka dari itu, prinsip moderasi bekerja dalam tiga lapisan:

1. Lapisan Ontologis

   Negara hanya dapat eksis sejauh ia menjaga keseimbangan internal antara elemen-elemennya. Negara yang kehilangan keseimbangan baik karena sentralisasi berlebihan maupun disintegrasi otonomi sedang menuju kehancuran ontologis.

2. Lapisan Epistemik

   Negara berpikir melalui lembaga dan kebijakannya. Moderasi menjamin agar rasionalitas negara tidak terjebak dalam dogma atau pragmatisme. Negara menjaga nalar publik dari dua ekstremitas, ideologi yang menutup dan populisme yang menenggelamkan.

3. Lapisan Etik-Politik

   Moderasi menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan dengan kesadaran akan batas. Kekuasaan sejati tidak didefinisikan pada kemampuan menundukkan, tetapi pada kemampuan mengatur diri sendiri. Dalam hal ini, moderasi adalah bentuk tertinggi dari aktualitas moral kolektif.

Negara Moderator Sebagai Manifestasi Ontologis Moderasi

Setelah memahami manusia sebagai subjek rasional (Bab III), dan negara sebagai struktur rasionalitas kolektif (Bab V), maka pada tataran ontologis, Negara Moderator dapat dipahami sebagai wujud aktual dari prinsip moderasi itu sendiri.

Negara Moderator bukan sistem politik alternatif antara kesatuan dan federalisme, melainkan realisasi dari hukum keseimbangan rasional di dalam struktur negara. Negara Moderator memandang kekuasaan sebagai energi moral, bukan hak milik yang bergerak di antara pusat dan daerah, individu dan masyarakat, kebebasan dan tatanan, serta bukan untuk memilih salah satu, tetapi untuk menjaga keduanya tetap hidup dalam harmoni.

Dengan demikian, moderasi bukan tujuan Negara Moderator, melainkan hakikat keberadaannya. Moderasi adalah modus eksistensi negara yang sadar akan keterbatasan nalar manusia, dan karena itu selalu membuka diri terhadap koreksi, dialog, dan refleksi dalam geraknya. Maka dari itu, Negara Moderator adalah jawaban atas stagnansi politik dan birokrasi yang terjadi di seluruh dunia yang tertatih-tatih mengikuti perubahan zaman.

Negara Moderator bukanlah partisipasi rakyat formalitas seperti apa yang hari ini terjadi di negara

demokrasi. Pada negara demokrasi hari ini, partisipasi rakyat hanya ada pada ruang yang bernama pemilihan umum. Setelah itu, kekuasaan dijalankan dengan logika oligarki demi kepentingan segelintir orang. Negara Moderator, partisipasi publik, hubungan pusat dan daerah dijalankan dengan logika kekuasaan sebagai kesadaran kolektif untuk mewujudkan kebaikan. Maka meskipun tidak akan membuka ruang kontestasi besar yang cenderung tidak terkontrol dan liberal, Negara Moderator akan membuka ruang kontestasi yang sangat terbatas kerpada calon pemimpinnya. Yaitu hanya kepada mereka yang paham pengetathuan teoritis dan memiliki kebijaksanaan praktis demi memastikan bahwa kekuasaan negara diberikan kepada orang pantas. Negara Moderator membuka ruang dialektis, kritis dan dialogis dalam produksi kebijakan publik saat pemerintahan dijalankan. Ruang untuk partisipasi publik dibukan seluas-luasnya dalam kerangka adab, demi menjaga bahwa ekstrimitas tidak memiliki tempat pada Negara Moderator.

Moderasi sebagai Logos Negara

Moderasi adalah bentuk tertinggi dari rasionalitas karena ia menegakkan kebenaran tanpa kehilangan kebijaksanaan. Moderasi mengajarkan bahwa berpikir tidak cukup hanya dengan mengetahui, tetapi juga dengan menimbang, serta memerintah

tidak cukup hanya dengan berkuasa, tetapi juga dengan menahan diri.

Negara Moderator adalah negara yang berfilsafat. Negara yang tidak hanya hidup dari hukum, tetapi juga dari nalar yang menyadarkan. Tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga memahami makna keadilan. Negara Moderator adalah negara yang menyadari bahwa kekuasaan adalah bagian dari tatanan moral alam dan bahwa eksistensi politik hanyalah sah sejauh ia selaras dengan prinsip keseimbangan universal.

BAB VII
DARI TEORI KE PRAKSIS: MODERASI SEBAGAI PROSES NEGARA YANG HIDUP

Antara Konsep dan Kehidupan

Tidak ada teori politik yang memiliki makna jika ia tidak mampu hidup di dalam praksis. Demikian pula dengan filsafat negara, betapapun rasionalnya, akan kehilangan makna bila berhenti pada tataran konseptual. Aristoteles mengingatkan bahwa pengetahuan sejati adalah pengetahuan yang dapat diwujudkan dalam tindakan (praxis). Dengan demikian, gagasan Negara Moderator harus diturunkan dari wilayah logos ke wilayah energeia — aktualitas rasional dalam kehidupan negara.

Ini merupakan sebuah kritik yang nyata tentang konsep demokrasi hari ini yang awalnya hanya bermakna sebagai mekanisme mengambil keputusan dalam sebuah tatanan polis kecil di Yunani kuno, kemudian hari ini dipaska menjadi

prinsip dasar dari negara modern yang mengatur manusia dalam jumlah yang sangat besar. Bahwa apa yang Aristoteles maksud dengan pengetahuan yang bisa dipraktekkan, secara a contrario bermakna pengetahuan yang berasal dari kesadaran ontologis tentang realitas. Karena pengetahuan imajinatif dan asumptif tidak akan pernah mendapatkan bentuk idealnya pada tatanan realitas.
Tidak ada bentuk demokrasi yang ideal hari ini. Semua adalah bentuk adaptasi yang disesuaikan dengan fakta dan kondisi masing-masing negara. Ada yang menerapkan demokrasi dalam bentuk negara kesatuan dan ada yang menerapkan demokrasi dalam bentuk negara federal.

Pertanyaannya kemudian adalah Manakah yang ideal diantara keduanya? Jawabannya adalah tidak ada yang ideal. Pertama adalah karena kesatuan dan federal adalah bentuk negara yang menjadi pilihan masing-masing negara. Kedua adalah demokrasi sebenarnya adalah mekanisme pengambilan keputusan yang dipaksakan menjadi prinsip dasar pengelolaan negara. Mungkin perumus demokrasi pun tidak pernah berekspektasi bahwa demokrasi akan dijadikan prinsip pengelolaan negara modern yang dari segi luas dan jumlah penduduk tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang di Yunani Kuno pada saat itu. Mereka bahkan mungkin tidak pernah berimajinasi bahwa manusia dapat mengorganisasi dirinya dalam

konteks kehidupan bersama sebesar negara modern hari ini.

Oleh karena itu, demokrasi dijalankan dengan tafsiran dan modifikasi yang sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Dan karena, demokrasi hanya konsep tentang pengambilan keputusan skala kecil, bukan tentang bagaimana mengelola kekuasaan skala besar, tidak ada negar yang tidak menerapkan oligarki dalam logika kekuasaannya hari ini. Fakta yang menjadi alasan mengapa pemerintah hanya mendatangi daerah terpencil hanya ketika menjelang pemilu dan setelah pemilu membagi kekuasaan kepada orang-orang terdekat atau kelompoknya. Karena rakyat hanya dibutuhkan ketika pemilu dan pemilu itulah demokrasinya. Dan ketika pemilu telah usai, maka kekuasaan akan dikelola dengan logika oligarki sebagai pilihan paling rasional untuk melindungi kepentingan kelompoknya.

Dalam negara demokrasi tidak ada tempat bagi nalar yang berdialektika. Kritik akan dianggap perlawanan, dan kebutuhan rakyat adalah kampanye untuk menutupi kepentingan ekonomi. Karena pengelolaan kekuasaan setelah pemilu menggunakan kacamata oligarki.

Ontologi Praksis Negara Moderator

Maka dari itu, setiap teori seharusnya adalah pengetahuan yang terefleksi dari realitas. Karena hanya pengertahuan yang hadir sebagai refleksi kondisi realitas-lah yang bisa diimplementasikan ke ranah praxis. Teori yang dilahirkan bukan dari kondisi realitas, tidak lebih dari imajinasi semu yang berlindung di balik kata idealisme. Dan dapat dipastikan memgandung cacat epistemik yang akan menyeret atau melahirkan ekstrimitas baru.

Negara bukan hanya tatanan normatif, tapi ia adalah organisme yang berpikir dan bertindak. Teori tanpa praksis melahirkan idealisme kosong, sementara praksis tanpa teori melahirkan kekacauan. Maka, Negara Moderator adalah usaha menegakkan kesatuan antara berpikir dan bertindak dalam tubuh negara — menjadikan rasionalitas bukan sekadar asas, tetapi irama yang menghidupi kekuasaan.

Negara hidup sejauh ia berpikir dan bertindak dalam kesadaran akan dirinya. Praksis negara bukan akumulasi kebijakan, melainkan ekspresi nalar moral yang bekerja di dalam sistem sosial. Negara yang moderat bukan negara yang pasif, tetapi negara yang sadar proporsi antara kehendak dan kebijaksanaan.

Dalam filsafat Aristotelian, tindakan yang baik bukan yang ekstrem, melainkan yang tepat waktu (Kairos) dan tepat kadar. Negara yang hidup menurut prinsip kairos tidak bertindak karena tekanan, tetapi karena pengenalan rasional terhadap konteks. Ia tidak terjebak dalam pragmatisme jangka pendek, tetapi menimbang akibat jangka panjang dengan prinsip kebajikan. Karena itu, moderasi praksis bukan pengendalian terhadap tindakan, tetapi penuntunan terhadap arah tindakan. Negara Moderator bertindak tidak untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi untuk menjaga rasionalitas keberadaannya.

Krisis-Krisis Universal Dunia Modern

Negara Moderator adalah konsep yang lahir dari kesadaran ontologis tentang manusia, masyarakat dan alam sebagai satu kesatuan realitas. Pada diskursus ontologis manusia, masyarkat dan moral, ada fakta-fakta universal yang mendahului negara. Fakta yang menjadi dasar Negara Moderator sehingga Negara Moderator adalah teori yang paling rasional untuk diterapkan hari ini. Fakta tersebut adalah:

1. Krisis Rasionalitas Politik

   Fakta:

   Negara modern dibangun atas nama rasionalitas, tetapi praktik politiknya dikuasai oleh kalkulasi pragmatis, bukan oleh nalar etik. Keputusan publik diambil untuk menang, bukan untuk benar. Kebenaran menjadi fungsi elektoral, bukan fungsi rasional.

   Implikasi:

   Negara kehilangan logos-nya — kehilangan kemampuan untuk berpikir tentang dirinya. Dalam kondisi ini, kebijakan berubah menjadi reaksi, bukan refleksi. Negara Moderator hadir untuk memulihkan rasionalitas politik sebagai fungsi kesadaran, bukan sekadar alat kekuasaan.

2. Krisis Etika Kekuasaan

   Fakta:

   Semua negara modern menghadapi paradoks yang sama: kekuasaan yang lahir dari rakyat justru sering menindas rakyat, dan kebebasan yang dijanjikan berubah menjadi kebebasan untuk mengeksploitasi.

Institusi kehilangan keutamaan moral (aretē).

Implikasi:

Kekuasaan menjadi mekanisme tanpa jiwa. Etika tidak lagi menjadi poros negara, melainkan hiasan normatif dalam konstitusi. Negara Moderator lahir untuk menegakkan kembali kebajikan sebagai prinsip pemerintahan, bukan sebagai slogan politik.

3. Krisis Pengetahuan dan Otoritas Epistemik

Fakta:

Kebenaran terfragmentasi menjadi opini. Setiap orang berbicara atas nama "data, " tetapi tidak ada kesadaran tentang makna dan konteksnya. Teknologi mempercepat arus informasi, namun menghapus hierarki pengetahuan.

Implikasi:

Masyarakat modern hidup dalam "bising epistemik": kebenaran dan kebohongan tidak lagi terpisahkan. Negara kehilangan otoritas moral untuk menjadi wasit kebenaran. Negara Moderator lahir sebagai upaya membentuk kesadaran epistemik

kolektif — negara yang memoderasi pengetahuan, bukan memonopoli informasi.

4. Krisis Demokrasi dan Representasi

   Fakta:

   Demokrasi yang dimaksudkan sebagai ruang partisipasi berubah menjadi arena transaksi. Kedaulatan rakyat direduksi menjadi angka di kertas suara. Mayoritas mengklaim legitimasi atas nama jumlah, bukan atas dasar kebijaksanaan.

   Implikasi:

   Negara kehilangan "kebijaksanaan kolektif". Yang menang bukan gagasan terbaik, tapi yang paling populer. Negara Moderator berangkat dari kesadaran bahwa kedaulatan sejati bukan milik jumlah, melainkan milik nalar yang mampu menimbang.

5. Krisis Identitas dan Fragmentasi Sosial

   Fakta:

   Teknologi komunikasi memperluas ruang publik, tapi menghancurkan ruang kebersamaan. Manusia terpecah ke dalam gelembung ideologis, algoritmik, dan

kultural. Solidaritas berubah menjadi tribalitas.

Implikasi:

Negara kehilangan kemampuan mempersatukan makna "kita." Kewarganegaraan tidak lagi menjadi identitas moral, melainkan label administratif. Negara Moderator hadir untuk memulihkan kesadaran koherensi sosial — kesadaran bahwa kebersamaan adalah syarat berpikir rasional.

6. Krisis Moderasi dan Ekstremitas Zaman

Fakta:

Setiap opini kini hidup di kutub ekstrem: liberalisme tanpa batas di satu sisi, fundamentalisme identitas di sisi lain. Media sosial mempercepat polarisasi, algoritma memperkuat kebencian.

Implikasi:

Zaman kehilangan ruang tengah. Negara kehilangan kemampuan menjadi penengah yang adil, karena setiap keputusan dianggap berpihak. Negara Moderator lahir untuk menegakkan kembali jalan tengah

Aristotelian — "mesotēs" — sebagai prinsip eksistensial negara.

7. Krisis Spiritualitas dan Kesadaran Diri Negara

   Fakta:

   Negara modern mampu menciptakan kemakmuran, tetapi tidak mampu menciptakan makna. Rakyat kenyang secara material tetapi lapar secara eksistensial. Hukum tertulis kuat, tapi rasa keadilan lemah.

   Implikasi:

   Negara menjadi mesin administratif tanpa jiwa. Ia bekerja, tapi tidak tahu mengapa ia bekerja. Negara Moderator memulihkan spiritualitas rasional negara — kesadaran bahwa negara bukan hanya sistem kekuasaan, tetapi organisme moral yang harus menyadari dirinya.

Sehingga dari tujuh fakta universal tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua negara modern mengalami degenerasi yang sama, yaitu kehilangan kemampuan untuk berpikir, menimbang, dan memoderasi dirinya.

Fakta-fakta tersebut adalah fakta yang menjadi dasar Teori Negara Moderator ini disusun. Karena permasalahan tersebut hanya bisa selesai pada konsep Negara yang melihat kekuasaan sebagai bentuk pelayanan publik yang memiliki kesadaran untuk membatasi dirinya sendiri. Maka dari itu, Negara Moderator hadir bukan sebagai alternatif ideologis, tetapi sebagai sistem kesadaran baru yang menempatkan nalar sebagai organ moral negara.

Rasionalitas Administratif dan Kebijaksanaan Publik

Salah satu tantangan terbesar dalam mentransformasikan teori menjadi praksis adalah birokrasi yang kehilangan nalar. Ketika rasionalitas direduksi menjadi efisiensi, dan kebijakan menjadi angka-angka, maka di titik itu negara berhenti berpikir.

Birokrasi modern sering menganggap keputusan rasional adalah keputusan yang cepat, padahal rasionalitas sejati adalah keputusan yang proporsional. Rasionalitas tidak diukur dari kecepatan, tapi pada ketepatan dan pemahaman akan substansi masalah. Demikian pula fakta tidak dimana kebijakan publik yang lahir dari kepentingan oligarki pasti akan melahirkan administrasi yang tidak rasional.

Fakta bahwa hari ini kebijakan publik bukanlah kebijaksanaan yang berpihak serta administrasi yang tidak rasional adalah fakta yang tidak bisa kita kesampingkan. Bahkan untuk memulai usaha kita harus mengeluarkan uang suap untuk pajabat-pejabat yang korup yang nilainya jauh lebih besar dari modal usaha itu sendiri. Pajak yang terlalu banyak objeknya sehingga rakyat seolah diperas dari seluruh aspek hidupnya. Dan jaminan sosial yang tidak menjamin kehidupan yang lebih baik. Adalah bukti permasalahan yang lahir dari kebijakan publik yang tidak berpihak dan administrasi yang tidak rasional.

Maka dari itu, Negara Moderator adalah konsep negara yang hadir untuk memulihkan rasionalitas birokrasi melalui tiga prinsip praksis:

1. Refleksivitas administratif, bahwa setiap kebijakan harus lahir dari refleksi, bukan sekadar prosedur.

2. Proporsionalitas moral, dimana efektivitas diukur tidak hanya dari hasil, tetapi dari kesesuaian tindakan dengan kebajikan publik.

3. Transparansi epistemik, keniscayaan bahwa negara harus terbuka terhadap kritik rasional agar kebijakan menjadi medan dialog, bukan dogma.

Tiga prinsip yang menjadi framework penyelenggaraan pemerintahan dalam Negara Moderator. Karena hanya dengan prinsip ini, kita bisa mentransformasikan birokrasi dari budak kekuasaan, menjadi wahana kebijaksanaan kolektif. Dan kita bisa menciptakan mekanisme administrasi yang rasional berbasis proporsionalitas.

Praksis Politik Moderat: Dari Kekuasaan ke Kepemimpinan Rasional

Dalam Negara Moderator, kekuasaan adalah energi sedangkan kepemimpinan adalah yang menentukan arah dan yang memastikan gerak sampai ke tujuan idealnya atau tidak. Arah adalah pengetahuan yang memberikan bentuk pada energi dalam wujudnya sebagai gerak. Sedangkan tujuan adalah kondisi ideal yang menjadi titik akhir dari gerak.

Maka dalam pandangan Negara Moderator, kekuasaan sebagai energi adalah potensi yang aktualitasnya sangat bergantung dari kepemimpinan yang mengendalikannya. Kekuasaan sebagai energi bisa menjadi mesin penghancur dengan daya destruktif yang luar biasa. Dan sejarah kita memiliki banyak catatan tentang bagaimana kekuasaan dijadikan sebagai mesin penghancur yang menciptakan perang dunia dan tirani.

Sampai hari ini pun kekuasaan masih belum dijalankan sesuai dengan konsep idealnya, adalah fakta yang menyebabkan setiap teori yang kemudian mengkritik kekuasaan, akhirnya justru terjebak pada ekstrimitas yang lain, yaitu anarkisme. Kritik yang akhirnya berubah menjadi kebencian, karena terlalu banyak fakta penyalahgunaan kekuasaan sedangkan kritik tidak dibangun berdasarkan pemahaman yang objektif dan rasional tentang kekuasaan.

Sehingga konsep tentang kekuasaan sebagai energi potensial dan kepemimpinan sebagai aktor intelektual yang memberikan arah dan menentukan tujuan dari sebuah kekuasaan merupakan fakta dan bukan sebatas asumsi. Kekuasaan

Pandangan Negara Moderator Negara Moderator tidak menghapus kekuasaan, karena menghapus kekuasaan senyatanya adalah bentuk ekstrimitas baru. Negara Moderator menuntun kekuasaan agar tetap rasional melalui kepemimpinan yang sadar akan batasannya. Kesadaran akan batasan kuasa adalah kesadaran untuk meregulasi dirinya sendiri. Dan hanya pada makna ini, otoriterianisme dan tirani tidak memiliki peluang untuk hadir. Kesadaran pemimpin akan batas dari kuasanya adalah apa yang disebut Kepemimpinan Moderat, yang menjadi model kepemimpinan pada Negara Moderator.

Kepemimpinan Moderat bukanlah kepemimpinan kompromistis, melainkan kepemimpinan yang berani menahan diri ketika kekuasaan berpotensi untuk disalahgunakan. Kepemimpinan Moderat berpihak bukan pada kepentingan, tetapi pada keseimbangan, karena keseimbangan adalah bentuk tertinggi dari keadilan.

Sebagaimana Aristoteles berkata dalam Ethics:

> *"To rule well, one must first have learned to be ruled. "*

Maka Negara Moderator adalah negara yang pemimpinnya mampu mendisiplinkan dirinya sebelum mendisiplinkan rakyatnya. Negara yang dipimpin oleh Kepemimpinan Moderat yang memerintah dengan berpikir, bukan bereaksi.

Praksis Sebagai Peneguhan Rasionalitas

Moderasi sebagai fakta realitas adalah bukti bahwa teori Negara Moderator bukan utopia, melainkan teori yang hidup. Ketika nalar menjadi prinsip tindakan, dan tindakan menjadi ekspresi nalar, negara mencapai keadaan rasional sepenuhnya. Bukan karena sempurna, tetapi karena sadar akan ketidaksempurnaannya. Negara yang berpikir adalah negara yang selalu berproses. Ia tidak pernah selesai, karena berpikir tidak pernah berakhir.

BAB VIII
NEGARA SEBAGAI KESADARAN DIRI: KESEMPURNAAN DALAM KETERBATASAN

Negara yang Menyadari Dirinya

Setiap sistem filsafat berakhir pada pertanyaan yang sama: apakah kesempurnaan dapat dicapai?

Aristoteles menjawab: tidak, kecuali dalam pengertian teleologis. Karena kesempurnaan bukan keadaan statis, melainkan arah dari proses. Maka dari itu, negara yang sempurna bukan negara tanpa cacat, tetapi negara yang sadar akan cacatnya dan terus menimbang dirinya dengan rasionalitas, dan terus bergerak berdasarkan kesadaran rasionalnya.

Negara Moderator dalam pengertiannya yang paling filosofis adalah bentuk aktualitas kesadaran diri secara kolektif. Negara Moderator adalah entitas yang mengerti dan sadar bahwa kekuasaan dapat menyimpang, manusia dapat tergoda, dan nalar dapat dibungkam. Karena itu, Negara

Moderator menanamkan mekanisme reflektif di dalam dirinya, dimana negara berpikir tentang negara, kekuasaan mengawasi kekuasaan, dan manusia menilai dirinya sebagai bagian dari keseluruhan. " Sebuah mekanisme yang seharusnya dimanifestasikan sampai pada kesadaran individu. Sehingga dalam pengertiannya yang paling sederhana, Negara Moderator adalah negara yang individu-individunya memiliki kesadaran yang sama.

Konsep ini mengkin akan terasa utopis ketika dijadikan titik start untuk memulai setiap ikhtiar menerapkannya. Namun ketika dijadikan sebagai tujuan ideal, maka Negara Moderator bisa kita terapkan saat ini juga dengan memilik pemimpin yang memenuhi kriteria kepemimpinan dalam Negara Moderator. Karena kekuasaannya niscaya akan digunakan untuk menggerakkan negara dan berevolusi sampai kebentuknya yang paling ideal, yaitu perwujudan kesadaran kolektif dari individu.

Mekanisme reflektif yang menjadi kesadaran inti Negara Moderator yang akan menjamin bahwa ketika Negara Moderator diterapkan pada kondisi terburuk pun, selama dijalankan oleh manusia yang masuk dalam kriteria kepemimpinannya, maka gerak kesadaran itu akan terjadi secara otomatis dan secara alamiah akan mengevolusi kesadaran kolektif individu. Karena mekanisme refelektif akan menjadi dialektika pengetahuan tanpa akhir pada interaksi antara individu dan masyarakat.

Dialektika yang tidak berhenti sampai semua mencapai titik idealnya. Seperti diskusi yang terus menerus terjadi sampai kedua subjek mencapai puncak pengetahuannya.

Epistemologi Kesadaran Negara

Dalam Negara Moderator, kesadaran negara bukan kesadaran psikologis, sebagaimana sains empiris mendefinisikan kesadaran hari ini sebagai kondisi jiwa. Melainkan kesadaran struktural yang lahir dari basis epistemologis dan kesadaran ontologis yang mendefinisikan negara sebagai entitas yang hidup dan berfikir sebagaimana yang telah saya jelaskan pada bab sebelumnya. Negara menjadi sadar ketika ia memiliki mekanisme untuk merefleksikan dan mengoreksi tindakannya sendiri. Itulah sebabnya, dalam Negara Moderator, kesadaran reflektif bukan tugas moral yang akan dibebankan kepada individsu. Tetapi kesadaran reflektif dalam pengertiannya sebagai fungsi sistemik negara.

Dalam tradisi Aristotelian, kesadaran ini disebut nous. Aristoteles menjelaskan nous sebagai "Intelektualitas yang aktif, yang menjadikan segala sesuatu dapat dipahami, tidak bercampur dengan tubuh". dan inilah satu-satunya bagian jiwa yang abadi dan ilahi. " Nous adalah evolusi tertinggi dari jiwa, dimana jiwa kesadarannya sudah bergerak dari pengetahuan yang hanya berpusat pada diri

sebagai individu ke kesadaran sebagai bagian dari keseluruhan. Inilah maksud dari pernyataan Aristoteles bahwa nous adalah bagian dari jiwa yang tidak berhubungan dengan tubuh.

Sebenarnya kata yang paling bisa mewakili makna dari nous dalam bahasa indonesia itu adalah akal. Cuma akal ini dalam perspektif empiris bukanlah sesuatu yang memiliki tempat untuk dibahas. Sehingga literatur yang menjelaskan tentang akal sebagai alat epistemologi, bukan literatur pengetahuan yang diruang-ruang akademik. Melainkan tumbuh subur dalam ruang-ruang kritis di luar wilayah akademik.

Dalam De Anima (III. 4–5), Aristoteles menguraikan nous sebagai bagian jiwa yang tidak berhubungan dengan tubuh, berbeda dari daya persepsi atau imajinasi.

Aristoteles membedakan dua bentuk nous:

- Nous Pasif (passive intellect) → potensi untuk memahami seperti tabula rasa yang siap menerima bentuk-bentuk.

- Nous Aktif (active intellect) → Nous pasif yang mengaktualkan potensinya untuk memahai "menjadikan segalanya dapat dipahami. "

Dari dua bentuk nous ini kita bisa memahami bahwa nous itu adalah sesuatu yang berevolusi pada diri manusia. Ini bisa dibuktikan dengan melihat perkembangan seseorang dari bayi hingga dewasa. Anak kecil dengan nous pasif, tingkat kesadarannya masih berada di level terendah, yaitu kesadaran tentang dirinya, kebutuhan fisiknya serta apa yang dia suka dan tidak suka. Tapi seiring perkembangannya, semakin banyak dia berinteraksi dengan realitas baik pengalaman hidup atau buku yang dia baca, maka kesadarannya akan bertambah, berubah dan bergerak dari kesadaran diri ke kesadaran ontologis tentang manusia sebagai individu yang menjadi bagian dari jiwa bersama yang disebut masyarakat.

Disinilah poin inti dari epistemologi negara yang menjadi ide paling fundamental tentang Negara Moderator. Evolusi gerak nous dari pasif menuju aktif ini sangat tergantung dari realitas eksternal yang dipersepsi manusia. Orang yang kemudian tumbuh besar di lingkungan lokalisasi akan memiliki kesadaran berbeda dengan orang yang tumbuh besar di lingkungan akademisi. Maka dengan menyusun konsep negara yang hadir sebagai realitas yang bisa mengaktualkan nous dari pasif menjadi aktif, maka negara itu telah mencapai bentuk idealnya sebagai wadah yang mengaktualisasikan kesadaran kolektif. Artinya semua perangkat negara mulai dari perspsi tentang kuasa, indikator kepemimpinan sampai pada model kebijakan publik harus ditujukan untuk

mengaktivasi kesadaran ini. Kesadaran yang disebut Aristoteles sebagai nous tentang politik.

Negara Moderator yang dibangun berdasarkan epistremologi ini adalah negara yang memiliki nous politik. Maka dari itu, Negara Moderator mampu melihat dirinya bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai manifestasi dari tatanan moral universal tentang manusia. Negara Moderator tidak mengklaim kebenaran atau menjadi otoritas terhadap kebenaran, tetapi berupaya mewujudkannya dengan kesadaran reflektif antara individu dengan negara yang berdialektika terus menerus tanpa henti. Dan inilah ciri Negara Moderator sebagai negara yang berfikir.

Etika Negara yang Dewasa

Negara yang dewasa bukan yang kuat, tetapi yang mampu mengendalikan dan meregulasi dirinya. Karena kuasa sebagai energi, berpotensi menjadi apa saja tergantung pemahaman yang ada pada manusia yang memegang kendalinya. Maka dari itu, pemimpin yang memegang kendali atas kuasa haruslah memiliki pemahaman tentang konsep-konsep moralitas dan etika yang menjadi dasar pengetahuannya tentang kebijaksanaan praktis (phronesis). Sehigga negara akan diarahkan oleh pemimpin untuk sampai pada tujuan tersebut.

Dalam etika politik Aristotelian, kebajikan tertinggi adalah sophrosyne. Pengendalian diri yang lahir dari kebijaksanaan. Karena ketika Negara Moderator menyatakan bahwa ia adalah negara yang meregulasi dirinya sendiri, maka pertanyaannya terkahirnya adalah siapa yang meregulasi siapa? Dan ini kembali pada pertanyaan di pembahasan awal tentang pertanyaan terakhir pada setiap diskursus tentang negara, yaitu siapa manusia yang menjadi pusat dari sebuah negara. Artinya Negara Moderator adalah negara yang bisa mengatur dan membatasi dirinya sendiri, karena manusia yang menjadi pusatnya adalah manusia yang sadar akan batasan dari kuasa yang dikendalikannya.

Ketika negara mencapai sophrosyne politik, ia tidak lagi bertindak karena dorongan eksternal, tetapi karena kesadaran moral internal. Negara seperti itu tidak memerlukan pengawasan berlebihan, karena rasionalitas telah menjadi kebiasaan. Hukum tidak lagi menjadi ancaman, tetapi ekspresi dari kebajikan kolektif dan check and balances akan mendapatkan definisinya yang paling sempurna. Sebagai mekanisme yang lahir dari kesadaran untuk membatasi diri sendiri.

Maka dari itu, Negara yang dewasa bukan negara yang memaksa warganya menjadi baik, tetapi negara yang menumbuhkan ruang di mana kebaikan menjadi rasional.

Kesempurnaan dalam Keterbatasan

Setiap bangsa memiliki lintasan sejarahnya sendiri menuju kedewasaan rasional. Bagi Indonesia, jalan menuju Negara Moderator bukan jalan revolusi, melainkan sebuah perjalan panjang tentang evolusi kesadaran. Kita tidak perlu mengganti sistem ketika membaca konsep ini, karena Negara Moderator dimulai dengan membangun cara berpikir baru. Konsep tentang Negara Moderator adalah konsep yang bisa diterapkan di semua level dan bentuk negara yang sudah ada. Karena pada tingkat teoritis, konsep Negara Moderator akan memnerikan substansi dari bangunan negara yang sudah ada tanpa harus merubah seluruh konsepnya atau menghadirkan negara yang betul-betul baru. Negara Moderator bisa menjadi ruh bagi negara kesatuan atau federal, bisa menjadi substansi yang mengisi kekosongan presidensial atau bahkan menjadi kritik bagi sistem yang sudah mengarah ke tirani.

Karena Moderasi adalah bentuk tertinggi dari kebebasan. Bukan kebebasan untuk melakukan apa saja, tetapi kebebasan untuk menimbang apa yang seharusnya dilakukan. Ketika bangsa telah mencapai kesadaran ini, hukum menjadi ringan, dan politik menjadi bagian dari kebijaksanaan hidup bersama.

Setiap negara pada akhirnya akan diuji oleh nalar sejarahnya sendiri. Negara yang mampu bertahan bukan yang paling kuat atau paling kaya, tetapi yang paling sadar akan batasnya dan mampu menyeimbangkan diri di dalamnya. Konsep tentang Negara Moderator adalah konsep yang berada di puncak kesadaran rasional manusia tentang negara. Bahwa negara adalah sebuah bentuk kehidupan bersama yang menyadari bahwa kekuasaan hanyalah sarana, dan berpikir adalah inti dari keberadaan.

Maka kesempurnaan bukanlah tidak melakukan kesalahan, melainkan tidak berhenti berpikir ketika kesalahan terjadi.

Itulah saat ketika negara benar-benar menjadi cermin bagi nalar manusia dan manusia menjadi cermin bagi nalar negara.

Yang akann terus bergerak secara dialektis dan transenden karena saling merefleksikan sampai sama-sama mengadirkan bentuk bayangan yang sempurna. Karena kesempurnaan negara ketika individu di dalamnya memikiki kesadaran akan ontologis tentang dirinya sebagai bagian dari realitas, dan kesempurnaan negara adalah ketika menjadi wadah yang mengaktualkan kesadaran tersebut.

****

ANÁMNĒSIS

Kembali ke Rasionalitas Publik

"Kita tidak sedang menemukan kebenaran baru; kita sedang mengingat kembali nalar yang pernah kita miliki."

Segala teori politik pada akhirnya adalah usaha manusia untuk mengingat. Kita tidak sedang menciptakan sistem baru, melainkan berupaya mengembalikan rasionalitas ke tempat asalnya — ke dalam diri manusia yang pernah berpikir dengan jernih sebelum dikeruhkan oleh ambisi dan algoritma.

Negara lahir dari akal, tetapi sering lupa bahwa ia seharusnya berpikir.Ketika kekuasaan berjalan tanpa refleksi, hukum kehilangan moralnya, dan rakyat kehilangan kepercayaannya. Kita menyebutnya birokrasi, kita menyebutnya sistem, padahal di dasarnya adalah kehilangan kesadaran: kehilangan logos yang dulu menjadi alasan kita membentuk negara.

Aristoteles menulis bahwa kebahagiaan tertinggi manusia (eudaimonia) adalah aktivitas berpikir yang sesuai dengan kebajikan. Maka negara yang bahagia bukanlah negara yang kuat, melainkan

negara yang berpikir sesuai dengan kebajikannya. Kekuasaan yang adil bukanlah yang menang, melainkan yang sadar akan proporsi dirinya di antara yang lain.

Namun di abad informasi, manusia telah mengganti kebijaksanaan dengan kecerdasan, dan mengganti nalar dengan data. Kita tahu banyak, tetapi memahami sedikit. Kita cepat bereaksi, tetapi lambat menimbang. Dan di tengah kecepatan itu, kita kehilangan ruang untuk berpikir bersama.

Di sinilah letak krisis terbesar zaman ini: bukan krisis ekonomi atau politik, melainkan krisis berpikir bersama — krisis rasionalitas publik. Rasionalitas publik adalah napas kehidupan bernegara. Tanpanya, demokrasi berubah menjadi teater opini, dan kebebasan menjadi kebisingan.

Ketika berpikir hanya dimiliki oleh segelintir elite, kebenaran kehilangan sifatnya sebagai milik bersama. Negara Moderator adalah ajakan untuk mengembalikan rasionalitas itu ke ruang publik. Rasionalitas yang tidak tinggal di menara gading, tetapi hidup di jalan, di rumah, dan di ruang percakapan sehari-hari.

Berpikir tidak boleh berhenti di universitas atau istana, karena berpikir adalah kewajiban moral seluruh warga negara yang ingin hidup secara beradab. Negara yang berpikir bersama rakyatnya tidak akan menjadi tirani dan rakyat yang berpikir bersama negaranya tidak akan menjadi massa. Keduanya membentuk komunitas reflektif —bangsa yang tahu apa yang sedang diperjuangkannya.

Moderasi bukan kompromi, tetapi keberanian untuk menimbang. Rasionalitas bukan kemewahan intelektual, tetapi bentuk tanggung jawab moral. Kekuasaan yang sejati bukanlah kemampuan memerintah,melainkan kesediaan untuk dikoreksi oleh nalar. Sebab negara yang sadar diri adalah negara yang telah mengingat kembali akalnya dan bangsa yang sadar diri adalah bangsa yang telah menemukan kembali keberanian untuk berpikir bersama.

"Negara Moderator bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan pulang. Ia adalah proses mengingat kembali."

Mengembalikan akal ke dalam kekuasaan, moral ke dalam hukum, dan manusia ke dalam negaranya sendiri. Ketika nalar kembali menjadi fondasi publik, kita tidak hanya membangun sistem yang lebih baik, tetapi juga peradaban yang lebih waras. Dan mungkin, hanya bangsa yang berani berpikir dengan jernihlah yang akan mampu bertahan di

tengah dunia yang kehilangan makna berpikir itu sendiri.

Jakarta, 2025
Andi Ryza Fardiansyah

DAFTAR PUSTAKA

Filsafat Yunani & Fondasi Klasik

1. Aristotle. Nicomachean Ethics. Translated by W. D. Ross. Oxford: Clarendon Press, 1925.
2. Aristotle. Politics. Translated by Benjamin Jowett. Oxford: Clarendon Press, 1885.
3. Aristotle. Metaphysics. Translated by W. D. Ross. Oxford: Clarendon Press, 1908.
4. Aristotle. Eudemian Ethics. Translated by H. Rackham. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1935.
5. Aristotle. De Anima (On the Soul). Translated by J. A. Smith. Oxford: Clarendon Press, 1931.
6. Plato. The Republic. Translated by Allan Bloom. New York: Basic Books, 1968.
7. Plato. Gorgias. Translated by Walter Hamilton. London: Penguin Classics, 1960.
8. Cicero. On Duties (De Officiis). Translated by M. T. Griffin and E. M. Atkins. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Rasionalisme Modern & Politik Awal

9. Bacon, Francis. Novum Organum. London: Routledge, 1900.
10. Descartes, René. Meditations on First Philosophy. Translated by John Cottingham. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

11. Hobbes, Thomas. Leviathan. London: Penguin Classics, 1985.
12. Locke, John. Two Treatises of Government. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
13. Rousseau, Jean-Jacques. The Social Contract. Translated by Maurice Cranston. London: Penguin, 1968.

Etika & Filsafat Moral

14. Kant, Immanuel. Groundwork for the Metaphysics of Morals. Translated by Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
15. Kant, Immanuel. Critique of Practical Reason. Translated by Lewis White Beck. New York: Macmillan, 1956.
16. Hegel, G. W. F. Philosophy of Right. Translated by T. M. Knox. Oxford: Oxford University Press, 1967.
17. Mill, John Stuart. On Liberty. London: Longman, 1859.
18. Mac Intyre, Alasdair. After Virtue: A Study in Moral Theory. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1981.
19. Nussbaum, Martha C. The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

20. Gadamer, Hans-Georg. Truth and Method. Translated by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall. London: Continuum, 2004.

Rasionalitas, Kekuasaan & Struktur Sosial

21. Weber, Max. Economy and Society. Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. Berkeley: University of California Press, 1978.
22. Habermas, Jürgen. The Theory of Communicative Action, Vol. 1–2. Boston: Beacon Press, 1984.
23. Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.
24. Foucault, Michel. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings. New York: Pantheon Books, 1980.
25. Foucault, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Translated by Alan Sheridan. New York: Vintage Books, 1977.
26. Bourdieu, Pierre. Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
27. Giddens, Anthony. The Constitution of Society. Cambridge: Polity Press, 1984.
28. Parsons, Talcott. The Social System. Glencoe: Free Press, 1951.
29. Dewey, John. Human Nature and Conduct: An Introduction to Social Psychology. New York: Henry Holt, 1922.

30. Ritzer, George. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Filsafat Praksis & Etika Politik

31. Arendt, Hannah. The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press, 1958.
32. Ricoeur, Paul. From Text to Action: Essays in Hermeneutics II. Evanston: Northwestern University Press, 1991.
33. Taylor, Charles. Philosophical Arguments. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995.
34. Dewey, John. Logic: The Theory of Inquiry. New York: Henry Holt, 1938.
35. Sen, Amartya. Rationality and Freedom. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002.

Kesadaran, Refleksivitas & Etika Publik

36. Husserl, Edmund. Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy. The Hague: Martinus Nijhoff, 1958.
37. Merleau-Ponty, Maurice. Phenomenology of Perception. Translated by Colin Smith. London: Routledge, 1962.
38. Honneth, Axel. The Struggle for Recognition. Cambridge: Polity Press, 1995.

39. Taylor, Charles. Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge: Harvard University Press, 1989.
40. Ricoeur, Paul. Oneself as Another. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
41. Habermas, Jürgen. Moral Consciousness and Communicative Action. Cambridge: MIT Press, 1990.
42. Mac Intyre, Alasdair. Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues. Chicago: Open Court, 1999.

Politik, Kebajikan & Moderasi Kontemporer

43. Sandel, Michael J. Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
44. Sen, Amartya. The Idea of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009.
45. Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.
46. Etzioni, Amitai. The Active Society: A Theory of Societal and Political Processes. New York: Free Press, 1968.
47. Huntington, Samuel P. Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press, 1968.
48. Fukuyama, Francis. The Origins of Political Order. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.

49. Berger, Peter L. , and Thomas Luckmann. The Social Construction of Reality. New York: Anchor Books, 1967.
50. Harari, Yuval Noah. Sapiens: A Brief History of Humankind. New York: Harper, 2014.
51. Diamond, Jared. Guns, Germs, and Steel. New York: W. W. Norton, 1997.

Refleksi Akhir & Spirit Filsafat Negara

52. Ricoeur, Paul. The Symbolism of Evil. Boston: Beacon Press, 1967.
53. Nussbaum, Martha C. Political Emotions: Why Love Matters for Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013.
54. Dewey, John. Freedom and Culture. New York: Putnam, 1939.
55. Mac Intyre, Alasdair. Whose Justice? Which Rationality? Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1988.
56. Arendt, Hannah. Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought. New York: Penguin Books, 1961.

Negara Moderator adalah refleksi tentang masa depan peradaban. Ketika negara tak lagi sekadar mesin kekuasaan, melainkan tubuh epistemik yang menjaga koherensi kebenaran.

Di tengah bisingnya opini dan ekstremitas zaman, buku ini mengajukan pertanyaan paling mendasar: bagaimana manusia tetap waras, berpikir jernih, dan hidup etis dalam dunia yang kehilangan pusat moralnya?

Melalui perpaduan antara filsafat Aristoteles, etika kebajikan, dan pemikiran kontemporer tentang kecerdasan buatan, Negara Moderator menuntun pembaca menyeberangi batas antara manusia dan algoritma, dari kesadaran mekanis menuju kesadaran reflektif.

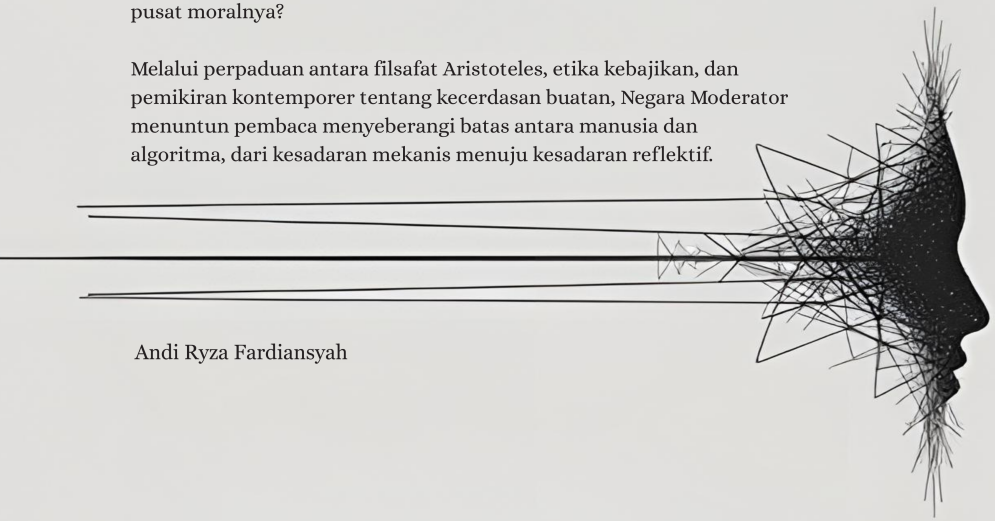

Andi Ryza Fardiansyah